

**MISI WALI KOTA BANDA ACEH DALAM MEWUJUDKAN
MASYARAKAT GEMILANG**

Diajukan

Oleh:

HANIF SAPUTRA RAHMATILLAH

NIM. 150403022

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2022

SKRIPSI

MISI WALI KOTA BANDA ACEH DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT GEMILANG

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program Sarjana dalam bidang
Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

HANIF SAPUTRA RAHMATILLAH

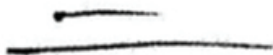
NIM. 150403022

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah

Disetujui Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing Pertama,



Dr. Mahmuddin, M.Si

NIP. 19721020 199701 1 002

Pembimbing Kedua,



Raihan, S.Sos.I., MA

NIP. 19811107 200604 2 003

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Siding Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Ilmu Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

HANIF SAPUTRA RAHMATILLAH

NIM. 150403022

Pada Hari/Tanggal
Sabtu, 21 Juli 2022

Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Mahmuddin, M.Si

NIP. 19721020 199701 1 002

Raihan, S.Sos.I., MA

NIP. 19811107 200604 2 003

Penguji I,

Penguji II,

Sakdiah, S.Ag., M.Ag

NIP. 19730713 200801 2 007

Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M.Ag

NIP. 19901004 202012 1 015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kusma Perti Hetta, M.Pd.

NIP. 196312201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Hanif Saputra Rahmatillah

NIM : 150403022

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 07 Juli 2022

Yang Menyatakan.



Hanif Saputra Rahmatillah
NIM. 150403022

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “*Misi Wali Kota Banda Aceh dalam mewujudkan masyarakat gemilang*”. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Masdar S.Ag, dan Ibunda tercinta Karnaini S.Ag, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan hingga terselesainya tugas akhir ini. Serta Adik tercinta Miftahul Hudsa, Haqqul Mizan dan Haris Qhufari sebagai penyemangat
2. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

3. Bapak Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA., selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah, dan Bapak Khairul Habibi, M. Ag selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah.
4. Bapak Dr. Mahmuddin, M. Si sebagai pembimbing I dan Ibu Raihan S.Sos.I, MA. Sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan, semangat dan motivasinya serta ide-ide dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabat terbaik yang senantiasa menemani dan memberikan semangat serta mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih untuk Ahmad Muhajir, M. Ali Musa, Ari Rahmat Sidiq, Riski Hernanda Wahyudi, David Giana.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 17 Juli 2022

Penulis,



Hanif Saputra Rahmatillah



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Misi Wali Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Masyarakat Gemilang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan misi wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak dan ibadah dan untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam penerapan misi wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak dan ibadah. Serta untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan misi wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah akhlak dan ibadah. Penelitian bersifat deskriptif menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Misi Wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak dan ibadah. Dalam penerapan Misi Wali Kota Banda Aceh ini beliau lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dan keimanan kepada Allah Swt. Adapun peluang dan tantangan dalam penerapan misi Wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak dan ibadah, yakni peluang bersumber dari Masyarakat itu sendiri agar mau partisipasi dalam menjalankan syariat Islam dan tantangan yang dihadapi oleh pihak dinas syariat Islam kurangnya tenaga kerja, tidak tersedia dengan cukup karena banyaknya item pekerjaan tentu membutuhkan personil yang banyak, dan juga minimnya masalah pendanaan. Sedangkan keberhasilan dan hambatan misi Wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah akhlak dan ibadah. Keberhasilan tersebut diantaranya diadakannya zikir gemilang, Safari dakwah daiyah Jum'at, Dakwah Daiyah Ramadhan, Dakwah Simpatik, Dakwah Warung Kopi, Safari Dakwah Sekolah-sekolah. dengan begitu masyarakat Kota Banda Aceh lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. Adapun hambatan berupa kurangnya partisipasi dari pihak masyarakat dan tantangan yang dihadapi walikota dalam penerapan untuk meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam diantaranya ada beberapa hambatan misalnya terutama dalam suasana Covid-19 banyak kegiatan yang terhambat dan di *cancel*, di samping itu juga Covid-19 ini juga membutuhkan dana yang besar sehingga banyak dana dan kegiatan terkuras untuk membiayai penanganan Covid-19.

Kata Kunci: *Misi, Banda Aceh, Masyarakat Gemilang*

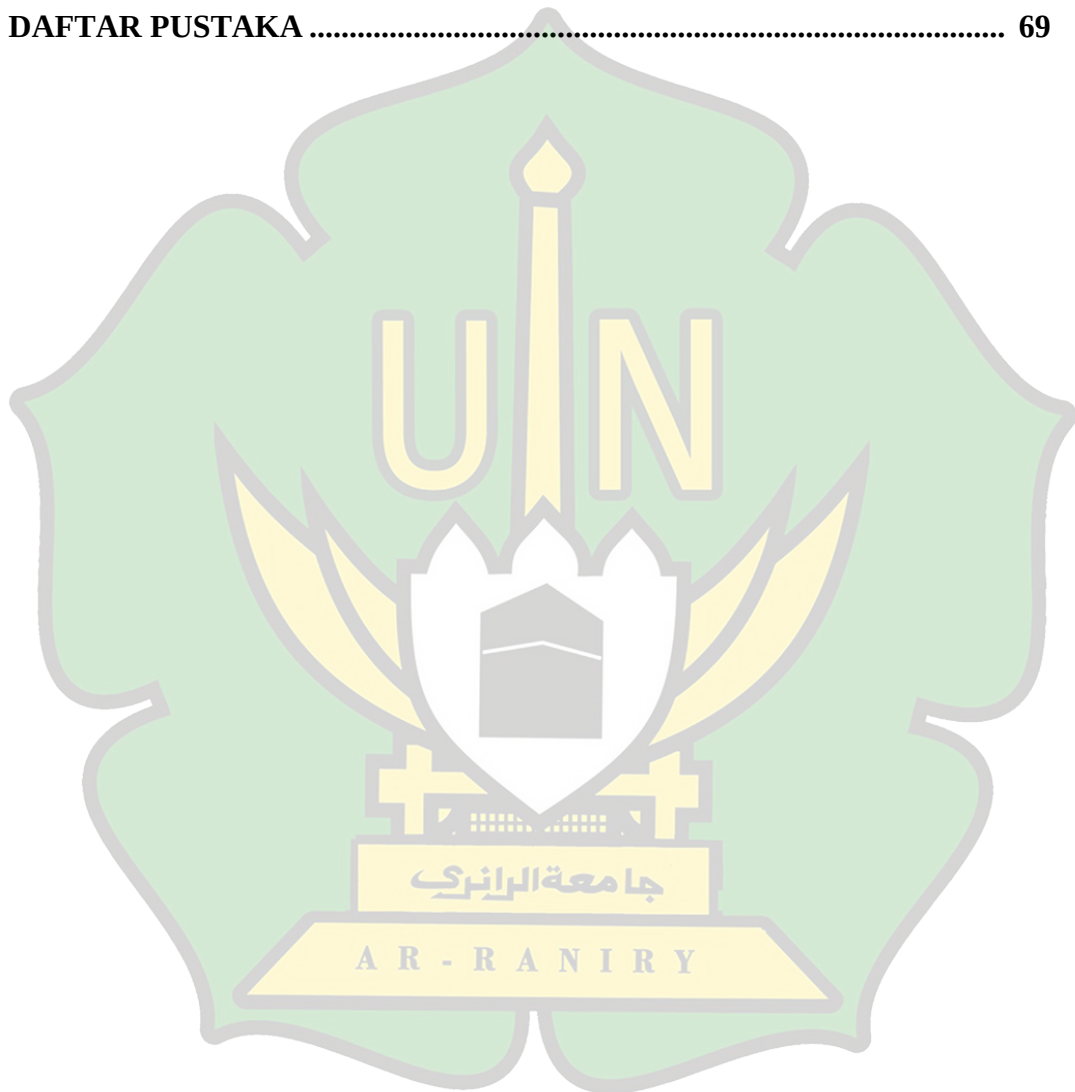
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II PEMBAHASAN	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Teori yang Terkait	17
C. Konsep Misi	40
D. Masyarakat	43
E. Perbedaan Antara Visi Dan Misi	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Sumber data	53
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh	58
B. Hasil Penelitian.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah masa lalu telah membuktikan bahwa di masa jayanya kerajaan Aceh pada abad ke 17, Banda Aceh yang pada waktu itu digelar Bandar Aceh Darussalam tersohor sebagai kota dagang, pusat agama Islam, ilmu pengetahuan di Asia Tenggara. Bahkan jauh sebelumnya pada abad ke 15 Banda Aceh telah muncul sebagai pusat kekuatan dan perlawanan yang tangguh.¹

Banda Aceh didirikan oleh Sultan Alaidin Johan Syah pada hari Jumat tanggal 1 Ramadhan 601 H (bertepatan dengan tanggal 22 April 1205). n Sultan Alaidin Johan Syah sebagai seorang utama (sarjana) yang telah dididlk dan dilatih dalam lembaga pendidikan Islam dayah Cot Kala Peureulak pada tanggal tersebut mengeluarkan dekrit tentang pembangunan ibukota negara yang baru untuk menggantikan Lamuri. (ibukota negara Kerajaan Hindu Indera Purba). Berdasarkan hasil penyelidikan tim ahli, lokasi untuk kota baru tersebut adalah dekat sungai Kuala Naga (Krueng Aceh) antara Gampong Pande dan Balang Peureulak, dan kota tersebut mulanya dinamakan Banda Darussalam.²

Selama pemerintahan Sultan Alaidin Johan Syah, ibukota negara masih tetap di Lamuri, sekalipun kota Banda Darussalam telah dinyatakan dengan resmi berdiri, namun Banda Darussalam baru dengan resmi dipindahkan pada masa

¹ A. Hasjmy, *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan*, (Makalah Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara. 1980), hal. 2

² Rusdi Sufi Iriani, *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, (Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hal. 1

pemerintahan Sultan Alaidin Mahmud Syah I (1267 - 1309 M) yaitu cucu dari Sultan Alaidin Johan Syah.

Setelah pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Husain Syah (1465-1480M) ia berhasil menggabungkan kerajaan Darussalam, kerajaan Islam Pidie dan kerajaan Islam Jaya menjadi satu federasi dengan nama kerajaan Aceh, kota Banda Darussalam diubah namanya menjadi kota Banda Aceh.

Banda Aceh terus berkembang, bahkan pada waktu jayanya kerajaan Aceh pada abad ke 16 dan ke 17, Banda Aceh menjadi tersohor, selcaligus sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, kebudayaan dan pusat pendidikan agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan ini juga dikenal sebagai lima besar dunia dalam bidang agama Islam yang setaraf dengan Bagdad, Damaskus, Agra, Isfahan dan Aceh Darussalam.³

Banda Aceh dikenal sebagai tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran islam ke seluruh Nusantara/ Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.⁴

³ Rusdi Sufi dkk, *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, (Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hal 2

⁴ Rusdi Sufi dkk, *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, (Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hal 2-3

Di masa jayanya, Banda Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh. Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembauran budaya. Hingga saat ini, budaya-budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut kota Banda Aceh. Misalnya di Budaya Pecinan di Gampong Peunayong dan peninggalan kuburan Turki di Gampong Bitai.⁵

Syari'at Islam di Aceh, dipahami oleh masyarakat bukan hanya dalam aspek hukum dan peradilan, tetapi mencakup berbagai bidang lain seperti pendidikan, ekonomi (kepemilikan dan pemanfaatan tanah, pembagian air sungai untuk irigasi, aturan menangkap ikan di laut dan seterusnya), pemerintah (paling kurang pada tingkat gampong dan mukim), berbagai bentuk dan tatacara pelayanan social, kegiatan seni dan budaya bahkan olah raga, tetapi karena keterbatasan tempat dan munasabah tulisan pada hari ini, maka uraian selanjutnya akan di pusatkan pada hukum dan peradilan.⁶

⁵ Rusdi Sufi Iriani Rewi Wanti Seno Djunlat, *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, (Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hal 3

⁶ Al Yasa' Abu Bakar, *Sekilas Syariat Islam di Aceh*, (Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), hal 4

Pada tahun 1947 atas persetujuan Gubernur Sumatera, residen Aceh dengan persetujuan DPRD membentuk mahkamah Syar'iyah. Setelah ini, Presiden Soekarno ketika berkunjung ke Aceh, pada Juni tahun 1948, menjanjikan izin pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Pada tahun 1949 Aceh ditingkatkan statusnya sebagai provinsi. Tetapi pada tahun 1950 sebagai akibat pembubaran RIS dan diberlakukannya UUDS 1950, provinsi Aceh di bubarkan dan daerah ini menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Pembubaran provinsi ini menjadikan pelaksanaan syariat tidak menentu, bahkan nasib Mahkamah Syar'iyah pun menjadi tidak jelas. Ketidakpuasan ini berujung dengan pecahnya pemberontakan pada tahun 1953 di bawah pimpinan Abu Daud Beureueh.

Pada tahun 1956 Provinsi Aceh dibentuk kembali, tetapi kewenangannya tidaklah seluas provinsi yang pertama dan karena itu keberadaan Mahkamah Syar'iyah tetap tidak jelas. Keadaan ini diperbaiki pada tahun berikutnya, dengan pengakuan pemerintah nomor 29 tahun 1957 (yang kemudian diubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957) dengan pengakuan ini tidak menghentikan tuntutan pelaksanaan Syariat Islam karena kewenangan mahkamah yang di bentuk pada tahun 1947. Pada tahun 1959 sebagai hasil musyawarah dewan revolusi DI/TII dengan wakil perdana menteri Republik Indonesia, kepada Aceh diberikan daerah istimewa dalam bidang agama, pendidikan dan peradatan.⁷

Aceh ber-ibukotakan di Banda Aceh, dari Banda Aceh inilah dimulainya aturan-aturan yang diterapkan kemudian dilanjutkan di daerah Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Aceh, namun saat sekarang ini walikota Banda Aceh di jabat

⁷ Al Yasa' Abu Bakar, *Sekilas Syariat Islam di Aceh*, (Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), hal 4-5

Oleh bapak Aminullah Usman dan wakilnya Bapak Zainal Arifin, bapak Aminullah sebagai Walikota Banda Aceh mempunyai keinginan untuk mewujudkan Kota Banda Aceh menjadi kota yang Gemilang sesuai dengan visinya yaitu *“Tewujudkan Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”*.

Dari fenomena yang terjadi di masyarakat masih kerap terjadi, pelanggaran-pelanggaran syari’at Islam di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh ada beberapa pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh ini Seperti pelanggaran busana syar’i dan pelanggaran Syariat Islam lainnya namun pada era modran ini banyak ditemui fashion busana atau pakaian yang belum syar’i, pakaian merupakan penutup aurat manusia sekaligus melindungi badan dari panasnya matahari dan dingin.

Namun demikian, pakaian bukanlah hanya sebagai pelindung serta penutup aurat saja tapi juga melindungi perempuan dari banyaknya ancaman para laki-laki serta fitnah yang pastinya di dukung dengan penggunaan pakaian dalam Islam. Berdasarkan dengan adanya Qanun Aceh No. 11 tahun 2002 pasal 13 dan pasal 23 ini, disimpulkan bahwasanya kriteria pemakaian busana islami yang sesuai dengan pasal 13 yaitu menggunakan pakaian yang menutup aurat, baik, sopan, tidak menunjukkan lekuk tubuh, serta tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihat. penggunaan pakaian menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat muslim Aceh.

Dari fenomena yang terjadi di masyarakat masih kerap terjadi, pelanggaran-pelanggaran syari’at Islam di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh

ada beberapa pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh ini seperti pelanggaran busana syar'i, pelanggaran *khalwat*, *meusum* dan *maisir*. Tentu saja ini menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota Gemilang dalam bingkai Syariat Islam. Adapun Misi Wali Kota Banda Aceh yaitu: Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah akhlak, dan ibadah.

Dari beberapa Misi Wali Kota Banda Aceh, ini penulis tertarik salah satu misi Wali Kota Banda Aceh yaitu; meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak dan ibadah dengan ini penulis ingin mengetahui penerapan misi tersebut diharapkan tidak ada lagi pelaku pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh ini. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik membuat kajian secara ilmiah terkait dengan misi yang dibuat oleh bapak Aminullah Usman untuk mewujudkan kota Gemilang dalam Bingkai Syari'ah. Adapun judul penelitian ini yaitu: **"Misi Wali Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Masyarakat Gemilang"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah dibahas di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan misi wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak dan ibadah?

2. Bagaimana peluang dan tantangan dalam penerapan misi wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak dan ibadah?
3. Bagaimana keberhasilan dan hambatan misi wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah akhlak dan ibadah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka peneliti ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui penerapan misi wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak dan ibadah.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan misi wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak dan ibadah.
3. Untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan misi wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah akhlak dan ibadah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis

1. Manfaat secara teoristis yaitu penelitian yang dilakukan kantor wali Kota Banda Aceh diharapkan menjadi tambahan karya ilmiah, juga mewujudkan masyarakat gemilang di Kota Banda Aceh.
2. Manfaat praktis yaitu:
 - a. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu usaha pengembangan potensi yang telah memiliki penulis tentang metode berpikir ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan meneliti ini diharapkan menjadi acuan dalam upaya mewujudkan masyarakat gemilang.
 - b. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan ikstisar pengetahuan dan khazanah perpustakaan sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya.

E. Penjelasan Istilah

Guna untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pengertian misi adalah pernyataan tentang apa yang harus di kerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi, misi merupakan sesuatu yang nyata untuk diwujudkan serta memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi. Pernyataan misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara organisasi bekerja. Pernyataan misi belum dapat digunakan sebagai petunjuk bekerja, diperlukan

interpretasi lebih mendetail agar pernyataan misi dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah kerja atau tahapan pencapaian tujuan sebagaimana tertulis dalam pernyataan misi.⁸

Misi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menerapkan atau mengimplementasikan praktik pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, dan ibadah di Kota Banda Aceh. Adapun misi 4 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk atau model implementasi dalam meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, dan ibadah Kota Banda Aceh.

2. Wali kota merupakan kepala daerah untuk daerah kota atau kota madya. Seorang wali kota sejajar dengan bupati, yakni kepala daerah untuk daerah kabupaten. Pada dasarnya, wali kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang di terapkan bersama DPR Kota Banda Aceh.
3. Masyarakat Gemilang. Masyarakat menurut Bahasa Inggris disebut “society” asal kata “sociuc” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari Bahasa Arab yaitu “syirk” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.⁹ Adanya saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula

⁸ Sukisno, *Visi Misi, Rencana Strategis & Taktis dalam Perguruan Tinggi*, Curriculum Development practice 1, Engineering Education Development Project dalam <http://www.eng.unri.ac.id> diakses pada tanggal 30 Mei 2021.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 157.

kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.¹⁰ Kata masyarakat hanya terdapat dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Malaysia. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya berhubungan dan pembentukan suatu kelompok atau golongan.¹¹ Adapun masyarakat gemilang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang maju dan sejahtera di Kota Banda Aceh.

4. Efektifitas yang dimaksud dalam penelitian ini meninjau efektifitas misi Wali Kota Banda Aceh dalam mewujudkan masyarakat gemilang dengan kriteria keseluruhan dan efesiensi, yaitu ketercapaian seluruh program pokok dan hasil yang diharapkan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini akan disusun terdiri atas lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang menguraikan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, de finisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab II, Merupakan landasan teoritis yang membahas tentang kajian terdahulu, Pengertian Misi, Sejarah Banda Aceh, Pengertian Masyarakat Gemilang, Masyarakat Islam.

¹⁰ M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco, (Bandung: Eresco, t.th), hlm. 63.

¹¹ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 11.

Bab III, Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan. Pada bab ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Selanjutnya juga dijelaskan objek dan subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, Merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Menguraikan tentang profil Wali Kota Banda Aceh, penerapan Misi Wali Kota Banda Aceh dalam peningkatan Syariat Islam dalam Bidang Penguatan Aqidah, Akhlak, dan Ibadah di Kota Banda Aceh.

Bab lima, merupakan bab penutup yaitu didalamnya berisikan hanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini akan penulis rangkumkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan saran penulis tujukan kepada pihak pemerintah Kota Banda Aceh, dan juga kepada para pembaca agar lebih memahami tentang penerapan misi Wali Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota gemilang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan kajian ini penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan kajian yang akan penulis teliti, hal ini sangat berguna untuk memberikan relevansi dan sumber data yang jelas bagi penulis. Adapun penelitian yang memiliki keterkaitan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muzakkir pada tahun 2016 dengan judul Tesisnya “Konsep Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Kota Madani”.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsep masyarakat madani yang diformulasikan oleh pemerintah kota Banda Aceh, mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota Madani dan mengetahui dan menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota Madani.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Qualitative Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada Balai Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep masyarakat madani yang diformulasikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah konsep

¹² Muzakkir, *Konsep Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Kota Madani*” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016), hlm. iv.

integritas, yaitu menggabungkan kedua elemen, masyarakat dan pemerintah kota yang tergabung dalam SKPK, dengan menyatukan kedua elemen tersebut menjadi kekuatan bagi pemerintah kota untuk melakukan program-programnya, konsep kota ini semata-mata bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang damai, tentram, toleransi, keberadaban yang tinggi, penuh dengan ketaatan, memiliki jiwa sosial, ukhwhah persaudaraan, dapat mengakses secara menyeluruh ke pelosok sehingga dapat menjadikan pemerintah sebagai *khadimatul ummah* (pembantu umat).

Sedangkan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota madani adalah melakukan peningkatan akidah dan pengamalan dengan membentuk tim *amar makruf nahi munkar* (TAMAR), Komite Penguatan Akidah dan Peningkatan Amalan Islam (KPA-PAI), meningkatkan pendidikan kepada anak-anak baik di sekolah dasar sampai menengah (Diniyah), serta mencegah timbulnya aliran sesat.

Peluang dan tantangan yang di hadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota madani adalah kelalain masyarakat yang menyebabkan meninggalkan ibadah kepada Allah, warnet yang beroperasi sampai larut malam, banyaknya pengemis yang datang ke Kota Banda Aceh, pelanggaran hukum, sempitnya lapangan kerja, pembangunan liar, serta pendidikan yang masih tertinggal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Aditira pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Kepemimpinan Aminullah Usman Dalam Membangun Kota Banda Aceh”.¹³ Tujuan penelitian dilakukan adalah Untuk mengetahui konsep Aminullah Usman dalam membangun Kota Banda Aceh dibidang agama dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan Aminullah Usman dalam membangun Kota Banda Aceh dibidang agama.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan Aminullah Usman dalam membangun Kota Banda Aceh dibidang Agama diawali dengan visi perwujudan Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai Syariat. Program yang dilakukan diantaranya peningkatan pelayanan Pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan Syariat Islam, penelitian dan pengembangan Syariat Islam, penyemarakkan Syiar Islam, usaha dakwah generasi muda dan kader dakwah, pembinaan kader dakwah. pemberdayaan sarana ibadah, pembinaan Aqidah umat, penyuluhan Agama Islam dan sosialisasi Qanun, keserasian kebijakan pelaksanaan Syariat Islam, pembinaan Fardhu Kifayah. Diterbitkannya himbauan yang menunjang penegakan Syariat Islam, diantaranya

¹³ Dede Adistira, *Kepemimpinan Aminullah Usman Dalam Membangun Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. iii

larangan membuka warung makan saat bulan puasa, larangan merayakan tahun baru Masehi dan hari Valentine.

Kemudian Faktor pendukung dalam pelaksanaan Syariat Islam berupa Merangkul satuan kerja perangkat Kota (SKPK), OKP dan Ormas serta TNI/POLRI, Kontrol dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi agar pelaksanaan Syariat Islam dapat berjalan secara kaffah, Penyuluhan kepada masyarakat melalui program dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Syariat Islam berupa keterbatasan dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengawasi tindak pelanggaran Syariat Islam, Sebagian pihak belum bisa menerima penerapan syariat Islam, ditambah lagi pihak-pihak yang menyebutkan bahwa ada pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan Syariat Islam, Kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap penegakan Syariat Islam itu sendiri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Debi Agus Mayanti pada tahun 2018 dengan judul penelitiannya “Strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Model Kota Madani”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan model Kota Madani. Untuk mencapai tujuan tersebut.

Peneliti ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan pihak

¹⁴ Debi Agus Mayanti, *Strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Model Kota Madani*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. iv

Humas Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas yang terkait, dan Masyarakat Kota Banda Aceh yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan secara sengaja unit analisis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan model Kota Madani yakni melalui aktifitas-aktifitas bekerjasama dengan berbagai pihak, memanfaatkan media massa, dan turun langsung ke masyarakat.

Kemudian hambatan dalam pengembangan Model Kota Madani yaitu keterbatasan personil yang melaksanakan tugas di lapangan, dan disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman dalam adat istiadat, faktor ekonomi, dan juga pendidikan.

Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjadikan model kota madani dengan membuat beberapa agenda, seperti dakwah jum'atan yang dilaksanakan setiap jum'at di Taman Sari, sosialisasi ke masyarakat tentang konsep dan aplikasi Kota Madani yang telah ditetapkan dalam visi-misi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Persamaa penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian sebelumnya dilakukan pada Kota Banda Aceh dengan metode kualitatif hal ini juga sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Namun perbedaannya adalah, penelitian pertama dalam tesis tersebut melihat konsep pemerintah dalam mewujudkan Kota Madani, tentu ini pada masa wali Kota Illiza Sa'aduddin

Djamal, sebelum masa kepemimpinan Aminullah Usman. Penelitian kedua melihat strategi kepemimpinan yang dilakukan Aminullah Usman secara umum, sedangkan yang ketiga melihat dari bidang Humasnya saja, tentu ketiga penelitian ini sangat berbeda yang penulis lakukan yakni penerapan misi dari wali kota dalam mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota gemilang dalam bingkai syariat Islam.

B. Teori-teori yang Terkait

1. Teori Struktural Fungsional

Menurut George Ridzer dan Douglas J. Goodman dalam bukunya *Teori Sosiologi Modern*, struktural fungsional terutama dalam karya Talcott Parsons, Robert Merton, serta pengikut mereka, mendominasi teori sosiologi selama beberapa tahun. Robert Nisbert menyatakan: “jelas bahwa fungsionalisme struktural adalah satu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang”. King Davis (1959) berpendapat, “fungsionalisme struktural adalah sinonim dengan sosiologi”. Alvin Gouldner (1970) secara tersirat berpendapat serupa ketika ia menyerang sosiologi barat melalui analisis kritis terhadap teori fungsionalisme struktural Talcot Parsons.¹⁵

Menurut Wirawan dalam bukunya *Teori-teori sosial dalam Tiga Paradigma* menyatakan bahwa strategi Talcot Parsons dalam buku pertamanya *The Structure Of Social Action* menyarankan teori dalam sosiologi harus mampu memanfaatkan konsep-konsep yang jumlahnya sangat terbatas, yang secara memadai mencakup aspek-aspek eksternal objektif. Konsep-konsep ini tidak

¹⁵ George Ridzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm. 117

merujuk pada fenomena kongkrit, tetapi pada elemen-elemen di dalamnya yang secara analitis terpisah dari elemen-elemen lainnya. Jadi pertama-tama teori harus melibatkan perkembangan konsep yang bersifat abstrak yang terdapat dalam realitas empiris, di dalam segala pemberdayaan serta keadaannya yang membingungkan.¹⁶

Dalam fungsionalisme struktural, istilah *struktural* dan *fungsional* tidak selalu perlu dihubungkan, meski keduanya biasanya dihubungkan. Walaupun dapat mempelajari struktur masyarakat tanpa memperhatikan fungsinya terhadap struktur lain. Begitu pula, dapat diteliti fungsi berbagai proses sosial yang mungkin tidak mempunyai struktur. Ciri utama pendekatan fungsionalisme struktural memperhatikan kedua unsur itu.¹⁷

Teori fungsional juga populer disebut teori integrasi atau teori konsensus. Tujuan utama pembuatan teori integrasi, konsensus, atau fungsional ini tidak lain agar pembaca lebih jelas dalam memahami masyarakat secara integral. Pendekatan fungsional menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. *General agreements* ini memiliki daya yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat.

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, secara fungsional terintegrasi kedalam suatu bentuk ekuilibrium. Oleh sebab itu, aliran pemikiran tersebut disebut *integration approach*, *order approach*, *equilibrium approach*, atau

¹⁶ Wirawan, *teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm. 231

¹⁷ George Ridzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm. 117-118

struktural-functional approach (fungsional struktural/fungsionalisme struktural). Pada mulanya, teori fungsional struktural diilhami oleh para pemikir klasik, di antaranya Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, Emile Durkheim, Robert K. Merton, dan Talcott Parsons. Mereka dengan gamblang dan terperinci menuturkan bagaimana perspektif fungsionalisme memandang dan menganalisis fenomena sosial dan kultural.¹⁸

a. Karakteristik Perspektif Struktural Fungsional

Menurut Wirawan dalam bukunya *Teori-teori sosial dalam Tiga Paradigma* menjelaskan tentang karakteristik struktural fungsional, menurutnya bahawa teori ini menekankan keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya antara lain: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan keseimbangan (*equilibrium*).

Functional (para penganut pendekatan fungsional) melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling tergantung sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan (*equilibrium*). Mereka memang tidak menolak keberadaan konflik didalam masyarakat, akan tetapi mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri kan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Inilah yang menjadi pusat analisis bagi kalangan fungsional.

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan

¹⁸ Wirawan, *teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm. 41

saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi dalam suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain.

Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional maka struktur ini tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrem teori bertanggung bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat.¹⁹

Meskipun timbul kebingungan, yakni rumusan yang longgar antara ide dan realitas, dari intuisi dan struktural sosial, kerancuan ini kadang berguna sebagai alat untuk membantu mengorganisasi pemikiran seseorang mengenai tatanan sosial. Namun, orang pun harus berhati-hati untuk mencari kasus-kasus dimana nilai dan norma dan hubungan-hubungan struktural yang aktual tidak berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, ketika nilai dominan, seperti persamaan kesempatan ekonomi dalam kapitalisme, ternyata tidak diwujudkan dalam struktur sosial yang ada.²⁰

Mengutip pendapat Lawer, dalam buku Wirawan berjudul *Teori-teori sosial dalam Tiga Paradigma*, bahwa teori ini mendasarkan pada tujuh asumsi, yaitu: (1) masyarakat harus di analisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berintegrasi; (2) hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik; (3) sistem sosial yang ada bersifat dinamis; penyesuaian yang ada tidak perlu banyak mengubah sistem sebagai satu

¹⁹ Wirawan, *teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm. 42

²⁰ Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontenporer*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 158

kesatuan yang utuh; (4) integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, sehingga di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan, tetapi ketegangan dan penyimpangan ini akan dinetralisasi lewat proses pelembagaan; (5) perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian; (6) perubahan merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi; dan (7) sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama.²¹

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kalangan fungsional memandang masyarakat manusia itu sebagai berikut:

- a. Masyarakat dipandang sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut.
- b. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan kecenderungan ke arah keseimbangan, yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang.
- c. Setiap kelompok atau lembaga melaksanakan tugas tertentu dan terus-menerus, karena hal itu fungsional. Contoh: sekolah, mendidik anak-anak, mempersiapkan para pegawai, mengambil tanggung jawab orang tua murid terutama pada siang hari dan sebagainya.

²¹ Wirawan, *teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm. 43

Masyarakat menurut model konsensus, oleh cohen di gambarkan sebagai berikut: (1) di dalam masyarakat terdapat norma dan nilai-nilai. Norma dan nilai merupakan elemen dasar dalam kehidupan sosial. (2) konsekuensi kehidupan sosial adalah komitmen. (3) masyarakat pasti kompak. (4) kehidupan sosial tergantung pada solidaritas. (5) kehidupan sosial didasarkan pada kerja sama dan saling memerhatikan dan saling membutuhkan. (6) sistem sosial tergantung pada konsensus. (7) masyarakat mengakui adanya otoritas yang absas. (8) sistem sosial bersifat integratif. (9) sistem sosial cenderung bertahan.

Kemampuan suatu bagian untuk mengaitkan dirinya dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan disebut konsensus. Dengan demikian, konsensus merupakan kesepakatan bersama antara bagian-bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat. Konsensus kemudian menjadi kesepakatan bersama antar bagian-bagian.

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif. Misalnya, lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada kepada generasi yang baru. Lembaga keluarga berfungsi menjaga kelangsungan perkembangan jumlah penduduk. Lembaga politik berfungsi menjaga ketatanan sosial agar berjalan dan ditaati sebagaimana mestinya. Semua lembaga tersebut akan saling berinteraksi dan saling menyesuaikan yang mengarah pada keseimbangan. Bila terjadi penyimpangan

dari suatu lembaga masyarakat, maka lembaga yang lainnya akan membantu dengan mengambil langkah penyesuaian.²²

b. Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Dalam bukunya George Ridzer dan Douglas J. Goodman, yang berjudul *Teori Sosiologi Modern* menjelaskan bahwa. Selama hidupnya Parsons membuat sejumlah besar karya teoritis. Ada perbedaan penting antara karya awal dan karya yang belakangan. Dalam bagian ini kita akan membahas karya-karyanya yang belakangan, teori struktural-fungsional. Bahasan tentang fungsionalisme struktural Parsons ini akan dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan”, terkenal dengan skema AGIL. Sesudah membahas empat fungsi ini kita akan beralih menganalisis pemikiran Parsons mengenai struktur dan sistem.

AGIL. Suatu *fungsi (fungsional)* adalah “kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem” Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem-*adaptation* (A), *goal attainment* (G), *integration* (I), dan *latensi* (L) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional ini dikenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan (*survive*), suatu sistem harus memiliki empat fungsi ini:

- 1) *Adaptation* (adaptasi) : sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

²² Wirawan, *teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm. 42-47

- 2) *Goal attainment* (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefenisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- 3) *Integration* (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, I, L).
- 4) *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Parsons mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat dalam semua sistem teoritisnya. Dalam bahasan tentang empat sistem tindakan di bawah, akan di contohkan bagaimana cara Parsons menggunakan skema AGIL.²³

Dalam buku Wirawan berjudul *Teori-teori sosial dalam Tiga Paradigma*, Parsons menjelaskan mekanisme sosialisasi merupakan alat untuk menanam pola kultural, seperti nilai-nilai, bahasa, dan lain-lain. Dengan proses ini anggota masyarakat akan menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma yang ada. Mekanisme kontrol juga mencakup sistem sosial, sehingga perbedaan-perbedaan dan ketegangan-ketegangan yang di masyarakat bisa ditekan.²⁴

Dilihat dari sudut pandang tindakan, tingkat yang paling rendah berupa lingkungan fisik dan organis, meliputi aspek-aspek tubuh manusia, anatomi dan fisiologinya. Tingkat paling tinggi, realitas terakhir, seperti dikatakan Jakson Toby, “berbau metafisik”. Namun Toby pun menyatakan bahwa Parsons “tidak mengacu

²³ George Ridzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), Hlm. 121

²⁴ Wirawan, *teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm. 47

kepada sesuatu yang bersifat supernatural ketika berbicara secara simbolik tentang ketidakpastian, kegelisahan, dan tragedi kehidupan sosial yang menantang makna organisasi sosial.”

Inti pemikiran Parsons ditemukan di dalam empat sistem tindakan ciptaannya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem tindakannya, berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan Parsons dan telah menjadi sumber utama kritikan atas pemikirannya.

Masih dalam buku yang sama Parsons menemukan jawaban problem di dalam fungsionalisme struktural dengan asumsi sebagai berikut:

1. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
2. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan
3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur
4. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
6. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem
7. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam.

Asumsi-asumsi ini menyebabkan Parsons menempatkan analisis struktural keteraturan masyarakat pada prioritas utama. Dengan demikian, ia sedikit sekali memperhatikan masalah perubahan sosial:

“kami rasa adalah tak ekonomis menjelaskan perubahan di dalam sistem yang berubah-ubah sebelum perubahan-perubahan itu sendiri dipisahkan dan dijelaskan, karena itu kami memilih untuk memulai dengan mempelajari kombinasi khusus dari variabel-variabel dan baru bergerak menuju deskripsi bagaimana kombinasi itu berubah bila landasan yang kuat untuk itu telah diletakkan.

Setelah mendapat kecaman keras karena orientasi statisnya itu, Parsons makin lama makin banyak mencurahkan perhatian pada masalah perubahan. Sebenarnya, seperti akan terlihat, ia akhirnya memusatkan perhatian pada evolusi masyarakat. Namun dimata kebanyakan pengamat, karyanya tentang perubahan sosial pun cenderung sangat statis. Perlu diingat bahwa empat sistem tindakan itu tidak muncul dalam kehidupan nyata, keempat itu lebih merupakan peralatan analisis untuk menganalisis kehidupan nyata.

Sistem sosial. Konsep Parson tentang sistem sosial berawal pada interaksi tingkat mikro antara ego dan alter. Ego yang di definisikan sebagai bentuk sistem sosial paling mendasar. Ia sedikit sekali mencurahkan perhatian untuk menganalisis tingkat mikro ini, meski ia menyatakan bahwa gambaran sistem interaksi ini tercemin dalam bentuk-bentuk yang lebih kompleks yang dilakukan oleh sistem sosial. Parsons dengan demikian mendefinisikan sistem sosial sebagai berikut:

“sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor-aktor individual yang *saling berinteraksi* dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor yang mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk “mengoptimalkan kepuasan”, yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam term sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural. Definisi ini mencoba menetapkan sistem sosial menurut konsep-konsep kunci dalam karya Parsons yakni: aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi, kepuasan, dan kultur.

Dalam analisisnya tentang sistem sosial, Parsons terutama tertarik pada komponen-komponen strukturalnya. Di samping memusatkan perhatian pada status peran, memperhatikan sistem komponen sosial berskala luas seperti kolektivitas, norma dan nilai. Namun dalam analisisnya mengenai sistem sosial, ia bukan semata-mata sebagai seorang strukturalis, tetapi juga seorang fungsionalis. Ia menjelaskan sejumlah persyaratan fungsional dari sistem sosial. *Pertama*, sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. *Kedua*, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem sosial yang lain. *Ketiga*, sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan. *Keempat*, sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya. *Kelima*, sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. *Keenam*, bila konflik akan menimbulkan kekacauan, itu harus

dikendalikan. *Ketujuh*, untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa.

Adalah jelas dalam diskusi Parsons tentang persyaratan fungsional sistem sosial bahwa ia memusatkan perhatian pada sistem sosial berskala luas dan pada hubungan antara berbagai sistem sosial luas itu (fungsionalisme kemasyarakatan). Bahkan ketika ia berbicara mengenai aktor, itu pun dari sudut pandang sistem. Bahasanya pun mencerminkan perhatian Parsons terhadap pemeliharaan keteraturan di dalam sistem sosial.

Aktor dan sistem sosial. Namun demikian, dalam menganalisis sistem sosial ini, Parsons sama sekali tidak mengabaikan masalah hubungan antara aktor dan struktural sosial. Ia sebenarnya menganggap integrasi pola nilai dan kecenderungan kebutuhan sebagai “dalil dinamis fundamental sosiologis”. Menurutnya, persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses internalisasi dan sosialisasi.

Parsons tertarik pada cara mengalihkan norma dan nilai sistem sosial kepada aktor di dalam sistem sosial itu. Dalam proses sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai itu diinternalisasikan (*internalized*); artinya, norma dan nilai itu menjadi bagian dari “kesadaran” aktor. Akibatnya, dalam mengajar kepentingan mereka sendiri itu, aktor sebenarnya mengabdikan kepada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan. Seperti dinyatakan Parsons, “kombinasi pola orientasi nilai yang diperoleh (oleh aktor dalam sosialisasi), *pada tingkat yang sangat penting, harus menjadidi fungsi dari struktural peran fundamental dan nilai dominan sistem sosial*”.

Umumnya Parsons menganggap aktor biasanya menjadi penerima pasif dalam proses sosialisasi. Anak-anak tak hanya mempelajari cara bertindak, tetapi juga mempelajari norma dan nilai masyarakat. Sosialisasi dikonseptualisasikan sebagai proses konservatif, di mana disposisi kebutuhan (yang sebagian besar dibentuk oleh masyarakat) mengikat anak-anak kepada sistem sosial, dan sosialisasi itu menyediakan alat untuk memuaskan disposisi kebutuhan tersebut. Kecil sekali, atau tak ada ruang, bagi kreativitas, kebutuhan untuk mendapatkan gratifikasi mengingatkan anak-anak kepada sistem sebagaimana adanya. Parsons melihat sosialisasi sebagai pengalaman seumur hidup. Karena norma dan nilai yang ditanamkan ke dalam diri anak-anak cenderung yang bersifat sangat umum, maka norma dan nilai itu tidak menyiapkan anak-anak untuk menghadapi berbagai situasi khusus yang mereka hadapi ketika dewasa. Karena itu sosialisasi harus dilengkapi dengan serangkaian pengalaman sosialisasi spesifik sepanjang hidupnya. Norma dan nilai yang dipelajari ketika masih kanak-kanak cenderung takl berubah dan dengan sedikit penguatan, cenderung tetap berlaku seumur hidup.²⁵

Sosialisasi dan kontrol sosial adalah mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial yang mempertahankan keseimbangannya. Individualitas dan penyimoangan diakomodasi, tetapi bentuk-bentuk yang lebih eksterm harus ditangani dengan mekanisme penyeimbangan ulang (*reequilibrating*). Demikianlah, menurut Parsons, keteraturan sosial sudah tercipta di dalam struktur sistem sosial itu sendiri:

²⁵ George Ridzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), Hlm. 121-126

Tanpa rencana sengaja dari siapapun, di dalam sistem sosial berkembang mekanisme yang mampu membalikkan dan mencegah kecenderungan penyimpangan menjadi lingkaran setan yang berada di luar kontrol persetujuan ketidaksetujuan dan sanksi imbalan hukuman.

Masyarakat, meskipun pemikir tentang sistem sosial meliputi semua jenis kehidupan kolektif, satu sistem sosial khusus yang sangat penting adalah masyarakat, yakni “kolektivitas yang relatif mencukupi kebutuhannya sendiri, anggotanya mampu memenuhi seluruh kebutuhan kolektif dan individualnya dan hidup sepenuhnya di dalam kerangkanya sendiri. Sebagai seorang fungsionalis struktural, Parsons membedakan antara 4 struktur atau subsistem dalam masyarakat menurut fungsi (AGIL) yang dilaksanakan masyarakat itu. *Ekonomi* adalah subsistem yang melaksanakan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui tenaga kerja, produksi, dan alokasi. Melalui pekerjaan, ekonomi menyesuaikan diri dengan lingkungan kebutuhan masyarakat dan membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan realitas eksternal. Pemerintah (*polity*) (atau sistem politik) melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan dan memobilisasi aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Sistem *fiduciary* (misalnya, di sekolah, keluarga) menangani fungsi pemeliharaan pola (latensi) dengan menyebarkan kultur (norma dan nilai) kepada aktor sehingga aktor menginternalisasikan kultur itu. Terakhir, fungsi integrasi dilaksanakan oleh *komunitas kemasyarakatan* (contoh, hukum), yang mengkoordinasikan berbagai komponen masyarakat.

Sistem kultural, Parsons membayangkan kultur sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial. Atau menurut istilahnya sendiri, kultur adalah kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Kultur menengahi interaksi antaraktor, menginteraksikan kepribadian, dan menyatukan sistem sosial. Kultur mempunyai kapasitas khusus untuk menjadi komponen sistem yang lain. Jadi, di dalam sistem sosial, sistem diwujudkan dalam norma dan nilai, dan dalam sistem kepribadian ia diinternalisasikan oleh aktor. Namun, sistem kultural tak semata-mata menjadi bagian sistem yang lain; ia juga mempunyai eksistensi yang terpisah dalam bentuk pengetahuan, simbol-simbol dan gagasan-gagasan. Aspek-aspek sistem kultural ini tersedia untuk sistem sosial dan sistem personalitas, tetapi tidak menjadi bagian dari kedua sistem itu.

Sistem kepribadian, sistem kepribadian (personalitas) tak hanya di kontrol oleh sistem kultural, tetapi juga oleh sistem sosial. Ini bukan berarti bahwa Parsons tak sependapat tentang kebebasan sistem personalitas. Parsons menyatakan:

Menurut saya, meskipun kandungan utama struktur kepribadian berasal dari sistem sosial dan kultural melalui proses sosialisasi, namun kepribadian menjadi suatu sistem yang independen melalui hubungannya dengan organisme dirinya sendiri dan melalui keunikan pengalaman hidupnya sendiri; kepribadian bukanlah merupakan sebuah epifenomenon semata.

c. Kelemahan Teori Struktural Fungsional

Disamping kelebihan-kelebihan yang dimiliki, teori fungsionalisme tidak luput dari kelemahan. Kelemahan teori ini bersumber pada anggapan dasarnya.

Pertama, anggapan dasar teori struktural fungsional terlalu menekankan pada peranan unsur-unsur normatif dari tingkah laku sosial, khususnya pada proses perorangan yang diatur secara normatif untuk menjamin terpeliharanya stabilitas sosial.

Bagi Lockwood apa yang disebutkan dengan “*substratum*” (disposisi-disposisi) yang mengakibatkan tumbuhnya perbedaan “*life chance*” dan kepentingan yang tidak bersifat normatif tidak memperoleh tempat yang wajar didalam pemikiran para penganut teori struktural fungsional.

Kedua, anggapan dasar bahwa bagi setiap sistem sosial memiliki kecendrungan untuk mencapai stabilitas atau ekuilibrium diatas konsensus para anggota masyarakat terhadap nilai-nilai umum tertentu. Hal ini mengakibatkan para penganut struktural fungsional kemudian menganggap bahwa: disfungsi, ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan sosial mengakibatkan terjadinya perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Semua itu pada dasarnya merupakan akibat dari pengaruh fakto-faktor yang datang dari luar (*extra systemic change*).

Berkaitan dengan itu, menurut Pierre L. Van den Berghe, anggapan dasar tersebut membuktikan bahwa teori struktural fungsional mengabaikan kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- a. Setiap struktural sosial, di dalam dirinya sendiri, mengandung konflik-konflik dan kontradiksi-kontradiksi yang bersifat internal yang pada gilirannya justru menjadi sumber terjadinya perubahan sosial.

- b. Reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan yang dari luar (*extra systemic change*) tidak selalu bersifat *adjustive*.
- c. Suatu sistem sosial di dalam waktu yang panjang dapat juga mengalami konflik sosial yang bersifat *visious circle*.
- d. Perubahan sosial tidak selalu terjadi secara gradual melalui penyesuaian yang lunak, akan tetapi dapat juga terjadi secara revolusioner.

Senada dengan pendapat diatas, Nasikun juga mengemukakan kelemahan pendekatan ini. Anggapan pendekatan ini mengabaikan kenyataan sebagai berikut:

1. Setiap struktur sosial, di dalam dirinya sendiri, mengadnsung kanflik dan kontradiksi yang bersifat internal, yang pada gilirannya justru menjadi sumber bagi terjadinya perubahan sosial.
2. Reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar (*extra systemic change*) tidak selalu bersifat *adjustive*.
3. Suatu sistem sosial, di dalam waktu yang panjang dapat juga mengalami konflik- konflik sosial yang bersifat *visious circle*.
4. Perubahan sosial tidak selalu terjadi secara gradual melalui penyesuaian yang lunak, akan tetapi dapat juga terjadi secara revolusioner.

Oleh karena mengabaikan kenyataan tersebut, maka pendekatan fungsional struktural dipandang sebagai fungsional yang bersifat reaksioner, dan oleh karenanya dianggap kurang mampu menganalisis masalah-masalah perubahan kemasyarakatan. Sisstem sosial tidak selalu mampu menyesuaikan diri terhadap

perubahan-perubahan yang dari luar, namun sering kali mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa mengalami disintegrasi. Sebaliknya, sistem sosial dapat juga menolak perubahan yang datang dari luar.

Begitu juga teori struktural fungsional hanya memperhatikan pada kelompok konkret, kekuasaan, konflik, dan perubahan sosial, sehingga dapat dianggap mengabaikan peran individu. Teori ini juga menganggap masyarakat bersifat harmoni, stabil, terintegrasi. Oleh sebab itu, dalam pandangan neofungsionalisme teori struktural fungsional harus mendapat autokritik dalam dunia observasi. Sekalipun demikian, teori struktural fungsional masih tetap didukung secara serius oleh kelompok minoritas yang signifikan secara sosiologis.²⁶

2. Teori Sistem

Setiap bidang ilmu mempunyai penganutnya, demikian pula dengan teori sistem. Teori sistem mempunyai sejarah yang bervariasi dalam sosiologi. Isu utama yang dibahas oleh Buckley adalah apa yang didapatkan sosiologi dari teori sistem. *Pertama*, karena teori sistem diturunkan dari ilmu pasti dan karena teori ini, setidaknya dimata pendukungnya, dapat diaplikasikan ke semua ilmu sosial dan behavioral, maka ia mengandung harapan bisa menyatukan ilmu-ilmu itu. *Kedua*, teori sistem mengandung banyak tingkatan dan juga dapat diaplikasikan pada aspek dunia sosial berskala besar dan terkecil, ke aspek yang paling subjektif dan objektif. *Ketiga*, teori sistem tertarik dengan keragaman hubungan dari berbagai aspek dunia sosial dan karenanya beroperasi terhadap berbagai analisis

²⁶ Wirawan, *teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), Hlm. 56-57

dunia sosial. Argumen dari teori sistem adalah bahwa hubungan dari bagian-bagian tidak dapat diperlakukan di luar konteks keseluruhan. Teori sistem menolak ide bahwa masyarakat atau komponen masyarakat berskala luas lainnya harus diperlakukan sebagai fakta sosial yang menyatu. Sebaliknya, fokusnya adalah pada hubungan dari proses-proses pada tingkat yang bervariasi di dalam sistem sosial.

Keempat, pendekatan sistem cenderung menganggap melihat semua aspek sistem sosiostruktural dari segi proses, khususnya sebagai jaringan informasi dan komunikasi. *Kelima*, dan mungkin yang terpenting, teori sistem secara interen bersifat intergratif. Buckley dalam definisinya tentang perspektif, memandang perspektif melibatkan integrasi struktur objektif berskala besar, sistem simbol, aksi dan interaksi, serta kesadaran dan kesadaran diri. Ball juga menerima ide integrasi level: individu dan masyarakat diperlakukan secara ekual, bukan sebagai entitas terpisah, tetapi sebagai bidang yang saling konstitutif, berkaitan melalui berbagai proses umpan balik. Dalam kenyataannya, teori sistem sangat akrab dengan integrasi sehingga Buckley mengkritik tendensi para sosiolog lainnya yang membuat perbedaan analisis antar level.

Adanya kecenderungan dalam kebanyakan sosiolog untuk menekankan pada apa yang dinamakan “perbedaan analitis” antara “personalitas”, sistem simbol (kultur), dan matriks relasi sosial, meski karya aktual dari proponen perbedaan

analisa ia tampak menyesatkan dan atau sering kali tak bisa bertahan dalam praktek.²⁷

Buckley mendiskusikan hubungan antarsistem sosiokultural, sistem mekanis, dan sistem organis. Buckley memfokuskan pada penjelasan perbedaan esensial antara sistem-sistem tersebut. Pada sejumlah dimensi ada suatu kontinum mulai dari sistem mekanis ke sistem organis ke sistem sosiokultural yang bergerak dari bagian yang kompleksitasnya kecil sampai yang paling besar, dan dari tingkatan terendah sampai tertinggi yang mana bagian-bagiannya dapat dinisbahkan pada sistem secara keseluruhan.

Pada dimensi lain, sistem lebih berbeda secara kualitatif ketimbang kuantitatif. Dalam sistem mekanis, kesalinghubungan dari bagian-bagian tersebut didasarkan pada transfer energi. Dalam sistem organik, kesalinghubungan dari bagian-bagian tersebut lebih didasarkan pada pertukaran informasi ketimbang pertukaran energi. Dalam sistem sosiokultural, kesalinghubungan itu bahkan lebih banyak didasarkan pada pertukaran informasi.

Tiga tipe sistem itu juga berbeda dalam derajat keterbukaan dan ketertutupannya yakni, dalam derajat pertukaran dengan aspek dari lingkungan yang lebih besar. Sistem yang lebih terbuka lebih mampu merespon secara selektif terhadap lingkungan yang lebih luas dan bervariasi. Dari sisi lain, sistem mekanis cenderung tertutup, sistem organik cenderung terbuka, dan sistem sosiokultural adalah yang paling terbuka.

²⁷ Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm. 237-239

Derajat keterbukaan dari suatu sistem akan terkait dengan dua konsep krusial dalam teori sistem: entropi atau tendensi sistem untuk surut dan *negentropi* atau kecendrungan sistem untuk mengembangkan (*elaborate*) sistem. Sistem tertutup cenderung bersifat entropik sedangkan sistem terbuka cenderung bersifat negentropik. Sistem sosiokultural juga cenderung mempunyai lebih banyak ketegangan ketimbang kedua sistem lainnya. Terakhir, sistem sosiokultural dapat bersifat porposif dan mengajarkan tujuan karena sistem itu menerima umpan balik dari lingkungan yang membuat mereka bisa terus bergerak mengejar tujuannya.

Umpan balik adalah aspek esensial dari pendekatan sibernetik yang diambil oleh para teoritis sistem untuk membahas sistem sosial. Ini bertentangan dengan pendekatan keseimbangan, yang menjadi ciri banyak sosiolog (semisal Parsons) yang beroperasi dari suatu pendekatan sistem. Dengan menggunakan umpan balik para teoritis sistem sibernetik mampu menangani friksi, pertumbuhan, evolusi dan perubahan mendadak. Keterbukaan dari suatu sistem sosial pada lingkungan dan dampak faktor lingkungan terhadap sistem adalah perhatian penting bagi para teoritis sistem ini.

Variabel dari proses internal juga memengaruhi sistem sosial. Dua konsep lainnya juga penting sekali dalam hal ini. *Morphostasis* merujuk pada proses-proses yang membantu sistem berubah dan mempertahankan diri, sedangkan *morphogenesis* merujuk pada proses-proses yang membantu sistem berubah dan tumbuh berkembang. Sistem sosial mengembangkan “sistem perantara” yang semakin kompleks yang mengintervensi di antara kekuatan eksternal dan tindakan sistem tersebut. Beberapa sistem perantara ini tumbuh semakin independen,

otonom, dan menentukan aksi dari sistem. Dengan kata lain, sistem perantara ini membuat sistem sosial bisa semakin kurang bergantung kepada lingkungan.

Sistem perantara yang kompleks ini melakukan beragam fungsi dalam sistem sosial. Misalnya, sistem-sistem perantara tersebut membuat sistem bisa menyesuaikan diri secara temporer dengan kondisi eksternal. Sistem-sistem perantara itu dapat mengarahkan sistem dari lingkungan yang keras ke lingkungan yang lebih menyenangkan. Sistem-sistem perantara itu juga dapat membuat sistem-sistem bisa merorganisasi bagian-bagiannya untuk menghadapi lingkungan secara lebih efektif.

Buckley (1967) berpindah dari diskusi prinsip umum ke aspek khusus dari dunia sosial untuk menunjukkan aplikasi teori sistem. Dia mulai pada tingkat individual, di mana dia sangat terkesan dengan karya Mead, di mana kesadaran dan tindakan saling berkaitan. Dalam kenyataannya, Buckley menyusun ulang problematik meadian dari sudut pandang teori sistem. Tindakan (*action*) dimulai dengan sinyal dari lingkungan, yang ditransmisikan ke aktor. Akan tetapi, transmisi mungkin diperumit oleh kekacauan (*noise*) dalam lingkungan. Saat ia bergerak, sinyal memberi informasi kepada aktor. Berdasarkan informasi ini, aktor bisa memilih respon. Kuncinya disini adalah mekanisme mediasi yang dimiliki aktor yakni kesadaran diri (*self-consciousness*).

Meskipun Buckley memandang bahwa kesadaran dan interaksi saling berkaitan dan bahwa levelnya tidak boleh dipisahkan, dia tetap bergerak dari domain kesadaran ke domain interaksional. Pola interaksi yakni imitasi dan respon-jelas sesuai dengan pandangan sistematis tentang dunia. Yang lebih penting,

Buckley mengaitkan dunia interpersonal secara langsung dengan sistem personalitas; dia memandang keduanya saling menentukan satu sama lain. Terakhir, Buckley beralih ke organisasi masyarakat berskala besar, khususnya peran dan institusi, yang dia lihat dari sudut sistematis dan berhubungan dengan level realitas sosial lainnya.

Buckley menarik kesimpulan dengan mendiskusikan beberapa prinsip umum dari teori sistem sebagaimana diaplikasikan pada domain sosiokultural. *Pertama*, teoritis sistem menerima ide bahwa ketegangan adalah normal, senantiasa hadir, dan merupakan realitas yang diperlukan sistem sosial. *Kedua*, ada fokus pada sifat dan sumber dari variasi dalam sistem sosial. Penekanan pada ketegangan dan variasi membuat perspektif sistem menjadi dinamis. *Ketiga*, ada perhatian pada proses seleksi di tingkat individual maupun interpersonal di mana beragam alternatif yang terbuka untuk sistem akan disortir dan disaring. Ini memperbesar dinamisnya. *Keempat*, level interpersonal dipandang sebagai basis pengembangan dari struktur yang lebih besar. Proses transaksional dari pertukaran, negosiasi, dan tawar-menawar (*bargaining*) adalah proses-proses yang memunculkan struktur sosial dan kultural yang relatif stabil. *Terakhir*, kendati ada dinamisme di dalam pendekatan sistem, ada pengakuan terhadap proses pengekalannya (*perpetuation*) dan transmisi. Seperti dikatakan oleh Buckley, “dari transaksi yang terus-menerus muncullah penyesuaian dan akomodasi yang relatif stabil”.

Ada catatan menarik: ada sejumlah kesamaan yang agak mencolok antara teori sistem dan pendekatan dialektika, meski mereka diturunkan dari sumber

yang sangat berbeda (yang satu ilmiah, yang satu lagi filosofis) dan mempunyai perbendaharaan yang sangat berbeda. Kesamaan-kesamaan antara keduanya itu adalah fokusnya pada relasi, prosese, kreativitas dan ketegangan.²⁸

C. Konsep Misi

1. Pengertian Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus di kerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi, Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk diwujudkan serta memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi, Pernyataan misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin di tuju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara organisasi bekerja. Pernyataan misi belum dapat digunakan sebagai petunjuk bekerja, diperlukan interpretasi lebih mendetail agar pernyataan misi dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah kerja atau tahapan pencapaian tujuan sebagaimana tertulis dalam pernyataan misi.²⁹

Visi biasanya dimulai dengan awalan “ter” seperti terwujudnya, terciptanya, tercapainya, dan seterusnya. Visi biasanya dikemukakan secara umum atau general, dan terkadang dengan nada idealis tetapi indekasi-indekasinya dapat di gambarkan lewat “misi”. Suatu organisasi harus menjelaskan misi tersebut kedalam tujuan-tujuan organisasi, baik tujuan jangka pendek, menengah, atau

²⁸ George Ridzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 238-242

²⁹ Sukisno, *Visi Misi, Rencana Strategis & Taktis dalam Perguruan Tinggi*, Curriculum Development practice 1, Engineering Education Development Project dalam <http://www.eng.unri.ac.id> diakses pada tanggal 30 Mei 2012.

jangka panjang. Tanpa dijelaskan kedalam tujuan yang jelas, maka organisasi tidak akan mengetahui ke arah mana akan melangkah.³⁰

Adapun misi suatu organisasi adalah suatu pernyataan umum dan abadi tentang maksud organisasi, ia merupakan organisasi lain dan bertujuan mengidentifikasi ruang lingkup cakupan organisasi tersebut. Adapun beberapa hal yang menjadi dasar pentingnya suatu misi organisasi, yaitu:

- a. Misi merupakan wujud dasar filsafat para pembuat keputusan strategik (pimpinan).
- b. Misi merupakan cerminan konsep diri organisasi.
- c. Misi dimaksudkan untuk menunjukkan bidang-bidang pokok garapan organisasi.
- d. Misi merupakan penentuan sasaran-sasaran yang akan di garap oleh suatu organisasi.³¹

2. Cara Menentukan Tujuan Misi

Setelah visi dan misi suatu organisasi ditetapkan maka langkah selanjutnya yang harus ditentukan adalah tujuan. Tujuan merupakan suatu hasil akhir, titik akhir, atau segala sesuatu yang akan dicapai. Dengan demikian, tujuan organisasi dapat dipahami sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi di maksud merealisasikannya. Tujuan organisasi dapat juga dikatakan sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya.

Dari pengertian tujuan di atas dipahami bahwa tujuan haruslah sesuatu yang harus diinginkan di masa yang akan datang. Maksudnya, keadaan yang diinginkan

³⁰ Sakdiah, *Manajemen Organisasi Islam*, (Dakwah Ar-Raniry Press, 2015), hlm. 40

³¹ Sakdiah, *Manajemen Organisasi Islam...*, hlm. 41

itu sebelum ada atau belum didapatkan pada saat tujuan ditentukan. Oleh karena itu, ketika suatu tujuan terpenuhi dapat saja diganti, ditambah atau diperluas cakupannya.³² Tujuan dalam suatu organisasi antara lain berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi kegiatan, makanya dengan adanya tujuan maka kegiatan organisasi akan jelas arahnya. Seperti ungkapan, “kapal tanpa tujuan akan terombang ambing ditengah lautan”
- b. Sumber legitimasi, maksudnya segala kegiatan yang dilaksanakan akan dianggap sah ketika ia berjalan menuju tujuan yang telah ditentukan.
- c. Standar pelaksanaan, maksudnya segala kegiatan yang dilaksanakan akan diukur keberhasilan atas kegagalannya bila tercapai atau tidaknya tujuan,
- d. Sumber motivasi, maksudnya tujuan bisa menjadi pendorong bagi orang-orang yang terlibat dalam pencapaian tujuan tersebut.
- e. Mengembangkan tugas dan tanggungjawab. Paling ada tiga cara menentukan tujuan yaitu: 1) ditentukan secara formal melalui pemungutan suara, 2) ditentukan oleh beberapa orang (pimpinan puncak dan pimpinan di bawahnya), 3) ditentukan oleh pimpinan puncak atau pengelola organisasi. Pada saat penentuan tujuan organisasi ada beberapa faktor yang mungkin akan mempengaruhinya, yaitu: a) departemen atau bagian organisasi, b) kepribadian si penentu tujuan, dan c) kekuatan lingkungan eksternal.

³² Sakdiah, *Manajemen Organisasi Islam...*, hal. 43

Laba atau keuntungan bukanlah tujuan, tetapi suatu produk sampingan karena melakukan sesuatu yang benar dengan cara benar. Jika laba dijadikan sebagai tujuan maka akan terjebak untuk menerapkan kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang. Misalnya, jika laba saja yang dicari, maka lingkungan tidak akan diperhatikan, tidak ada proses kaderisasi justru yang ada pergantian personil, dan sebagainya.³³

D. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat menurut bahasa Inggris disebut “*society*” asal kata “*socius*” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari Bahasa Arab yaitu “*syirk*” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.³⁴ Adanya saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.³⁵ Kata masyarakat hanya terdapat dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Malaysia. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya berhubungan dan pembentukan suatu kelompok atau golongan.³⁶ Masyarakat menurut para ahli sosiologi adalah sebagai berikut:

- a. Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.

³³ Sakdiah, *Manajemen Organisasi Islam...*, hal. 44

³⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 157.

³⁵ M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco, (Bandung: Eresco, t.th), hlm. 63.

³⁶ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 11.

- b. Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.
- c. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dalam pengertian lain masyarakat atau disebut *community*³⁷ (masyarakat setempat) adalah warga sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu negara. Apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama, memenuhi kepentingan-kepentingan hidup bersama, maka disebut masyarakat setempat.³⁸

Dari pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan manusia (sosial) yang hidup dalam suatu tempat dan saling bergaul (interaksi) antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan (adat/norma) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan.

2. Masyarakat Dalam Islam

Dalam Islam diungkapkan, bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT dari seorang laki-laki dan perempuan, berkelompok agar diantara mereka saling mengenal dan menjalin hubungan dengan masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Hujurat ayat 13 yang artinya:

³⁷ Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 14.

³⁸ Soejono Soekamto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali, 1990), hlm. 162 .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.” (Al-Hujurat : 13).³⁹

Ayat diatas memberikan penjelasan bagaimana manusia bergaul dengan sesamanya, hai semua manusia, kami menjadikan kamu bermacam-macam umat (berbangsa-bangsa) dan bernegri-negri bukan supaya kamu berperang-perangan melainkan supaya berkenal-kenalan dan berkasih-kasihan antara satu dengan yang lain. Satu bangsa tidak lebih dari bangsa lain, melainkan dengan ilmu pengetahuannya dan kecakapannya, sedang orang yang terlebih mulia disisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Oleh sebab itu patutlah segala bangsa insaf, bahwa mereka dajadikan Allah bukanlah untuk berperang-perangan melainkan untuk berkenalan antara satu dengan yang lain.⁴⁰

1. Faktor-faktor / unsur-unsur masyarakat:

- a. Beranggotakan minimal dua orang.
- b. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
- c. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan aturan hubungan antar anggota masyarakat.

³⁹ Yayasan Penerjemahan Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Parca, 1983), hlm. 518.

⁴⁰ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004), hlm. 766.

- d. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.
2. Ciri/kriteria masyarakat yang baik, Diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan/disebut sebagai masyarakat:
 - a. Ada sistem tindakan utama
 - b. Saling setia pada system tindakan utama
 - c. Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota
 - d. Sebagian atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran/reproduksi manusia.⁴¹

Secara fungsional masyarakat menerima anggotanya yang pluralistik (majemuk) itu dan mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik untuk tercapainya kesejahteraan sosial para anggotanya yaitu kesejahteraan lahir dan batin. Pluralisme adalah sistem nilai yang memandang secara positif-optimis terhadap kemajemukan, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin atas dasar kenyataan itu.⁴²

Konsep pluralisme dalam Islam tampaknya sudah terbawa pada misi awal agama ini diturunkan, yakni membagi “kasih” terhadap seluruh alam tanpa batas-batas atau benturan dimensi apapun. Semuanya adalah bagaimana menjadikan agama Islam sebagai agama yang lekat dengan nilai kemanusiaan dan ke-Ilahian. Dan ketika Tuhan telah hadir dalam aktifitas manusia, maka dimensi akhlakul

⁴¹ blog-indonesia.com/blog-archive-6802-124.html. Selasa, 24-11-2009. 9 diakses pada tanggal 18 Juli 2021

⁴² Ruslani, “*Cak Nur, Islam dan Pluralisme*” dalam *Pluralitas Agama, Kerukunan dan Keragaman*, (Jakarta: PT Gramedia, Cet. ke -1, 2001), hlm. 48.

karimah dalam berinteraksi sosial akan muncul dengan sendirinya, sehingga kita secara alamiah akan menghargai kemajemukan (pluralisme) tersebut. Sebaliknya, Al-Qur'an mengancam masyarakat yang senang kemungkar, kesesatan, dan perbuatan maksiat. Sebab dampak yang ditimbulkan akan membawa kehancuran yang meliputi semua orang, malapetaka akan mengancam seluruh umat.⁴³

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *“Dan hendaklah diantara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, maka itulah orang-orang yang beruntung”*. (QS. Ali Imran: 104).⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dan masyarakat perlu selalu diingatkan dan diberi keteladanan. Kalaupun tidak semua anggota masyarakat dapat melaksanakan fungsi dakwah maka hendaklah ada diantara kamu wahai orang-orang yang beriman segolongan umat, yakni kelompok yang pandangan mengarah kepadanya untuk diteladani dan didengar nasihatnya yang mengajak orang lain secara terus menerus tanpa bosan dan lelah kepada kebajikan, yakni petunjuk-petunjuk ilahi, menyuruh masyarakat kepada yang ma’ruf, yakni nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik oleh masyarakat mereka, selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ilahiah dan mencegah mereka dari yang munkar yakni yang dinilai buruk lagi diingkari oleh akal sehat masyarakat.

⁴³ Ruslani, *“Cak Nur, Islam dan Pluralisme” dalam Pluralitas Agama, Kerukunan dan Keragaman....*, hlm. 92

⁴⁴ Yayasan Penterjemahan Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Parca, 1983), hlm. 43.

Mereka yang mengindahkan tuntunan ini dan yang sungguh tinggi lagi jauh martabat kedudukannya itulah orang-orang yang beruntung, mendapatkan apa yang mereka dambakan dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁴⁵

Sedangkan toleransi sosial dalam diskursus ini bisa juga dikatakan sebagai toleransi kemasyarakatan. Dalam toleransi sosial ini Allah telah menjamin tidak melarang manusia untuk hidup bermasyarakat dengan mereka yang tidak seiman dan satu keyakinan agama.⁴⁶ Dalam toleransi sosial ini, Islam menengakkan tentang prinsip hidup dalam pluralitas yang ada dalam masyarakat dari segi sosial, Islam juga berprinsip bahwa untuk menegakkan itu semua maka diperlukan kerjasama dalam batas-batas yang tidak “menodai” akidah masing – masing agama tetapi kerjasama tersebut adalah untuk menjalankan syari’at agama masing – masing. Dan tampaknya kita perlu yakin bahwa ketika struktur kemasyarakatan dibangun atas dasar kebersamaan atas dasar adanya toleransi sosial tentunya kondisi dalam masyarakat akan baik.⁴⁷

Maka secara prinsipil toleransi dalam kehidupan kita harus dibangun melalui sikap yang tidak memaksa dalam beragama, yang berarti ada kebebasan dalam memeluk agama dan keyakinan masing – masing, atau dalam bahasa agama adalah “lakum dinukum waliyaddin”.⁴⁸ Dan dalam kehidupan sosial, toleransi terhadap selain kita adalah suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan dengan

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta: lentera Hati, 2002), hlm. 173.

⁴⁶ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 436.

⁴⁷ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 4437 – 4439.

⁴⁸ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 432.

baik, karena memang dianjurkan oleh Allah SWT. Toleransi atau tasamuh, artinya membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan, saling memudahkan.⁴⁹

E. Perbedaan Antara Visi dan Misi

1. Pengertian Visi dan Misi Secara Umum

Visi dan Misi tidak dapat di pisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang terikat. Dimana ada visi pasti di dalamnya juga harus ada misi. Visi dan misi harus dimiliki oleh setiap organisasi demi kemajuan bersama. Oleh karena itu semua orang wajib mengerti apa itu visi dan misi beserta perbedaannya. Visi adalah sebuah cita-cita umum yang harus di capai oleh sebuah lembaga atau organisasi sedangkan pengertian misi adalah cara yang akan dilakukan guna mencapai cita-cita yang sudah ditetapkan tersebut. Jadi, visi dapat di katakan sebagai tujuan utama dari sebuah organisasi atau lembaga .Visi ini sangat penting, hal ini di karenakan visi merupakan orientasi utama sebuah organisasi di bentuk atau didirikan.

Sedangkan misi dapat di artikan sebagai langkah yang harus di ambil untuk mencapai visi yang sudah di tetapkan. Sebuah organisasi baru bisa mengungkapkan misinya jika sudah mempunyai visi atau tujuan utama yang jelas. Setiap organisasi harus mempunyai visi dan misi yang jelas agar tahu apa yang harus dicapai dan dilakukan agar lebih terarah.⁵⁰

⁴⁹ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 430.

⁵⁰ <http://vio.co.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 20 Juli 2021

2. Visi Menurut para Ahli

Berbicara mengenai visi dan misi, para pakar pendidikan Mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian visi dan misi menurut para ahli di jelaskan sebagai berikut:

Menurut Graff A.R Mengartikan Visi sebagai pandangan yang jauh dan mendalam serta meluas. Visi juga di artikan sebagai daya pikiran yang abstrak dan memiliki kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini dapat menerobos semua batas baik fisik, tempat, dan waktu.

Menurut Kotler berpendapat bahwa, visi sebagai penjelasan mengenai tujuan sebuah organisasi. Ekspresi dari tujuan ini berupa produk dan jasa, kebutuhan, masyarakat, dan nilai yang diharapkan sebagai cita-cita di masa depan.

Menurut Wibisono Mengartikan visi adalah rangkaian sebuah kalimat yang berisi mengenai impian dan cita-cita dari organisasi yang harus dicapai.

3. Misi Menurut Para Ahli

Tidak hanya visi, para Ahli lain juga mengungkapkan pendapat mengenai pengertian misi yang sesungguhnya. Berikut penjelasan misi Menurut para Ahli:

Menurut Sinamo Misi merupakan sebuah keinginan yang ingin di capai atau akan menjadi apa di masa depan. Sinamo mengungkapkan misi adalah *What do we want to be*

Misi Menurut Whelen mengartikan bahwa misi sebagai deretan dari kalimat yang isinya mengenai tujuan dari perusahaan untuk para konsumennya.

Menurut Sapta Nirwandar misi adalah sebuah kegiatan atau langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan.⁵¹



⁵¹ <https://vio.co.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 20 Juli 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan tampilan yang merupakan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat tertangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.⁵²

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok.⁵³

Sedangkan ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk *deskriptif*, yaitu penelitian yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak).⁵⁴

Adapun penelitian ini hanya berfokus pada misi Wali Kota Banda Aceh khususnya dalam meningkatkan pelaksanaan syari'at islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak dan ibadah dan tidak ada pada bidang lain.

⁵² Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), hal. 22.

⁵³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2002), hlm. 31.

⁵⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 130.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada kantor Walikota Banda Aceh Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.7 Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh. Alasan memilih lokasi ini karena belum ada peneliti sebelumnya yang meneliti tentang permasalahan yang sama.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian yang penulis dapatkan terbagi 2 yaitu melalui:

1. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang di ambil dari informan penelitian, yaitu Walikota Banda Aceh, dan beserta jajarannya.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data pelengkap dalam penulisan yang diperoleh dari masyarakat, hasil pengamatan penulis, dan buku-buku.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berkenaan dengan teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Observasi

Observasi meliputi kegiatan muatan perhatian suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁵⁵ Observasi lebih kepada bentuk fisik yang ada, yang dapat di tangkap oleh pancaindra. Metode ini salah satu yang akurat untuk mengadakan sebuah penelitian, karena metode ini langsung terjun langsung ke

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Aneka Cipta, 2002), hlm. 133

tempat penelitian. Dari metode observasi ini penulis akan melakukan pengamatan mengenai hal-hal program kegiatan walikota dalam mewujudkan kota gemilang dalam pelaksanaan syari'at islam di bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muammalah dan syiar islam disini penulis ingin melihat program-program apa saja yang dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh dalam upaya menuntaskan aksi pelaku syariat islam dan merehabilisasi para pelaku tersebut tidak melanggar Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara adalah tatap muka antara periset (seseorang yang mengharapkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih.⁵⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara terstruktur. Dimana peneliti membuat daftar pertanyaan sesuai dengan responden atau informan yang akan diwawancarai dan pertanyaannya sesuai dengan daftar pertanyaan. Wawancara dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dengan responden-responen terkait. Adapun nama-nama informan yang peneliti wawancarai adalah sebagai berikut:

- a. Wali Kota Banda Aceh, sebagai kepala atau pemimpin Kota Banda Aceh.
- b. Wakil Wali Kota Banda Aceh, salah seorang yang membuat program untuk terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai kota madani.

⁵⁶ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya 2004), hlm. 87

- c. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, salah seorang yang ikut membuat program untuk terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai kota madani.
- d. Kepala Bagian Keistimewaan Kota Banda Aceh, menurut penulis kepala bagian ini dapat memiliki informasi tentang proses mewujudkan kota Banda Aceh sebagai kota Madani.
- e. Kepala Dinas Syariat Kota Banda Aceh, ini bagian yang terpenting dalam proses mewujudkan kota Banda Aceh sebagai kota Madani.
- f. Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Kota Banda Aceh, salah satu bidang di Dinas Syariat Islam yang paling aktif dalam proses terwujudnya kota Banda Aceh sebagai kota Madani.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, surat kabar, majalah, catatan, transkrip, kebudayaan dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian.⁵⁷

Metode ini akan mengarah pada data-data yang ada pada Misi Walikota Banda Aceh dalam mewujudkan kota Gemilang yang berbentuk dokumen, mengandung keterangan-keterangan yang berkaitan dengan Misi Walikota Banda Aceh. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk dapat mengetahui

⁵⁷ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya 2004), hlm. 274

dokumen-dokumen yang berupa catatan, transkrip buku, brosur, surat kabar, majalah dan artikel lainnya yang berkaitan dengan Program Walikota Banda Aceh.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini, dan melihat kaitan variabel-variabel yang ada.⁵⁸

Teknik analisis data merupakan salah satu dari proses penelitian,. Dimana data-data yang di peroleh dari lapangan akan dipilih dan diatur kemudian diurutkan dan di kelompokkan menjadi beberapa jenis katagori. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu pengamatan/observasi dan wawancara mendalam. Dalam melakukan analisis data tersebut dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan data peneliti. Analisis data dilakukan beberapa tahap diantaranya:

1. Reduksi data

Data yang di peroleh di tulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang telah disusun berdasarkan data yang diperoleh di reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan Strategi Walikota Banda Aceh

2. Penyajian data

Data yang diperoleh di kategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga mempermudah peneliti untuk melihat pola-

⁵⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 26

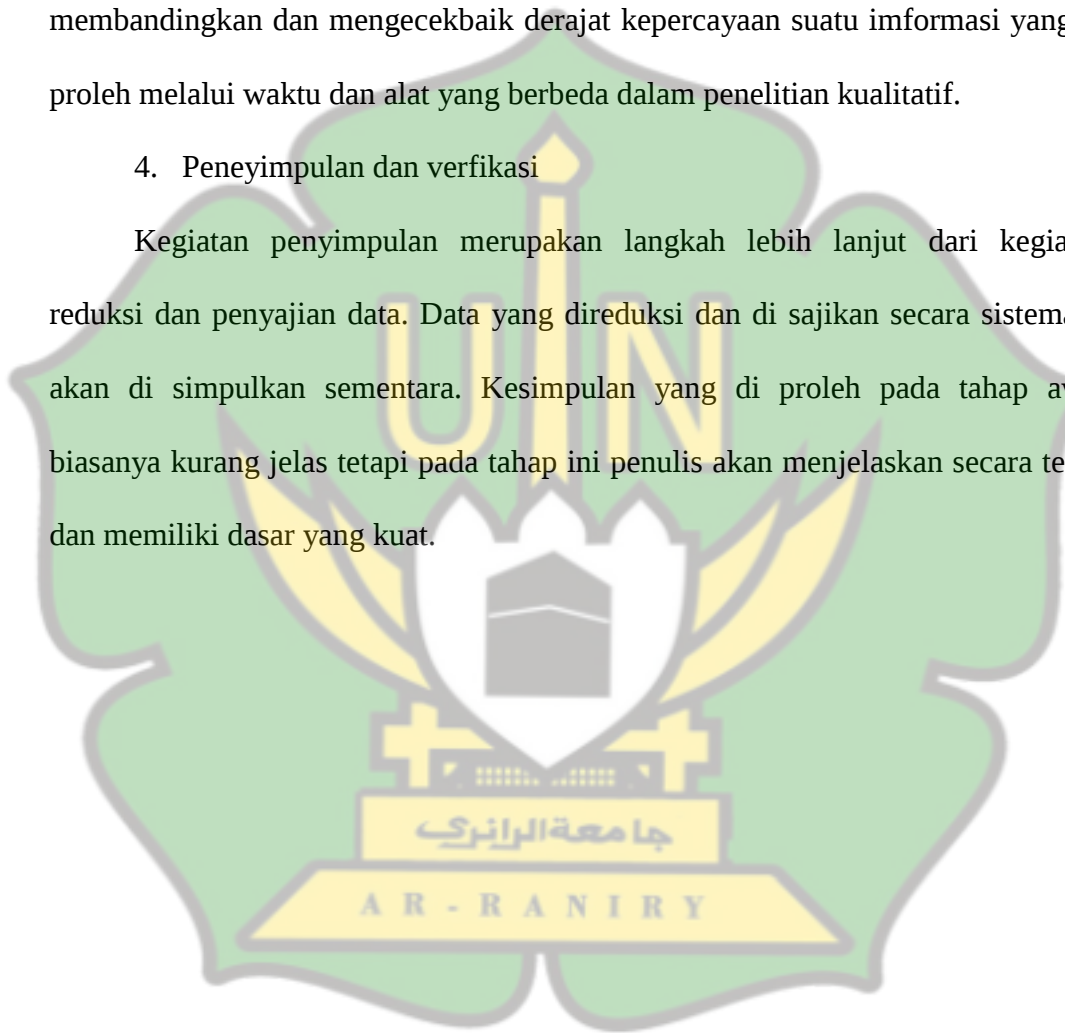
pola hubungan yang satu dengan pola lainnya yang berkaitan dengan Strategi Walikota Banda Aceh.

3. Menganalisis data

Membandingkan data yang diperoleh dengan metode triangulasi yaitu membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

4. Peneyimpulan dan verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas tetapi pada tahap ini penulis akan menjelaskan secara tegas dan memiliki dasar yang kuat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Sejarah masa lalu telah membuktikan bahwa di masa jayanya kerajaan Aceh pada abad ke 17, Banda Aceh yang pada waktu itu digelar Bandar Aceh Darussalam tersohor sebagai kota dagang, pusat agama Islam, ilmu pengetahuan di Asia Tenggara. Bahkan jauh sebelumnya pada abad ke 15 Banda Aceh telah muncul sebagai pusat kekuatan dan perlawanan yang tangguh.⁵⁹

Banda Aceh didirikan oleh Sultan Alaidin Johan Syah pada hari Jumat tanggal 1 Ramadhan 601 H (bertepatan dengan tanggal 22 April 1205). n Sultan Alaidin Johan Syah sebagai seorang utama (sarjana) yang telah dididlk dan dilatih dalam lembaga pendidikan Islam dayah Cot Kala Peureulak pada tanggal tersebut mengeluarkan dekrit tentang pembangunan ibukota negara yang baru untuk menggantikan Lamuri. (ibukota negara Kerajaan Hindu Indera Purba). Berdasarkan hasil penyelidikan tim ahli, lokasi untuk kota baru tersebut adalah dekat sungai Kuala Naga (Krueng Aceh) antara Gampong Pande dan Balang Peureulak, dan kota tersebut mulanya dinamakan Banda Darussalam.⁶⁰

Selama pemerintahan Sultan Alaidin Johan Syah, ibukota negara masih tetap di Lamuri, sekalipun kota Banda Darussalam telah dinyatakan dengan resmi berdiri, namun Banda Darussalam baru dengan resmi dipindahkan pada masa

⁵⁹ A. Hasjmy, *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan*, (makalah seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara. 1980), hlm. 2

⁶⁰ Rusdi Sufi Irini Rewi Wanti Seno Djunlat, *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, (Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hlm. 1

pemerintahan Sultan Alaidin Mahmud Syah I (1267 - 1309 M) yaitu cucu dari Sultan Alaidin Johan Syah.

Setelah pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Husain Syah (1465-1480M) ia berhasil menggabungkan kerajaan Darussalam, kerajaan Islam Pidie dan kerajaan Islam Jaya menjadi satu federasi dengan nama kerajaan Aceh, kota Banda Darussalam diubah namanya menjadi kota Banda Aceh. Banda Aceh terus berkembang, bahkan pada waktu jayanya kerajaan Aceh pada abad ke 16 dan ke 17, Banda Aceh menjadi tersohor, selcaligus sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi. kebudayaan dan pusat pendidikan agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan ini juga dikenal sebagai lima besar dunia dalam bidang agama Islam yang setaraf dengan Bagdad, Damaskus, Agra, Isfahan dan Aceh Darussalam.⁶¹

Banda Aceh dikenal sebagai kota yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran islam ke seluruh Nusantara/ Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.⁶²

⁶¹ Rusdi Sufi Irini Rewi Wanti Seno Djunlat, Sejarah Kota Madya Banda Aceh, (Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hlm. 2

⁶² Rusdi Sufi Irini Rewi Wanti Seno Djunlat, Sejarah Kota Madya Banda Aceh, (Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hlm. 2-3

Di masa jayanya, Banda Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh. Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembauran budaya. Hingga saat ini, budaya-budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut kota Banda Aceh. Misalnya di Budaya Pecinan di Gampong Peunayong dan peninggalan kuburan Turki di Gampong Bitai.⁶³

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Misi Wali Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pelaksanaan Syari'at Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh melalui wawancara dengan sejumlah informan terkait dengan penerapan Misi Wali Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang penguatan Aqidah, Akhlak dan Ibadah maka hasil penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut. Terkait dengan penerapan misi Wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan Syari'at Islam dalam bidang penguatan aqidah yaitu menjadikan kota Banda Aceh

⁶³ Rusdi Sufi Irini Rewi Wanti Seno Djunlat, Sejarah Kota Madya Banda Aceh, (Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hlm. 3

sebagai kota gemilang dalam bingkai syari'ah. Adapun misi tambahan yang lain dari keinginan Wali Kota Banda Aceh diantaranya:

- a. Sebagai Kota Zikir
- b. Menjadikan kota Banda Aceh sebagai kota hafizd

Kedua misi tambahan tersebut timbul setelah beliau menjadi Wali Kota Banda Aceh, namun misi utama Wali Kota Banda Aceh menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota gemilang dalam bingkai syari'at. Kemudian misi tersebut dipecahkan dalam beberapa konteks syari'at Islam diantaranya melaksanakan syari'at Islam dalam bidang penguatan Aqidah, ibadah dan syiar Islam. Adapun penerapan misi Wali Kota Banda Aceh Diantaranya sebagai berikut:⁶⁴

- a. Dakwah Kajian Malam Ahad
- b. Dakwah daiyah Jum'at
- c. Dakwah Daiyah Ramadhan
- d. Dakwah Simpatik
- e. Dakwah Warung Kopi
- f. Safari Dakwah Sekolah
- g. Zikir Gemilang

Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh mengatakan bahwa program ini merupakan implementasi dari misi Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Ibrahim Plt Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada 12 Juni 2022.

dalam meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, dikatakannya, kegiatan ini rutin dilaksanakan seperti:⁶⁵

a. Dakwah kajian malam Ahad

Dakwah kajian malam ahad ini rutin dilaknakan setelah ba'da isya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Adapun pelaksanaa dakwah ini sudah dilaksanakan sebanyak 176 kali dalam jangka waktu 4 tahun seperti data di bawah ini:

- 1) Tahun 2018 sudah 44 kali dilaksanakan safari dakwah malam ahad di masjid-masjid
- 2) Tahun 2019 sudah 44 kali dilaksanakan safari dakwah malam ahad di Masjid-masjid
- 3) Tahun 2020 sudah 16 kali dilaksanakan safari dakwah malam ahad
- 4) Tahun 2021 sudah 44 kali dilaksanakan safari dakwah malam ahad

b. Dakwah Daiyah Ramadhan

Dakwah daiyah Ramadhan ini rutin dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan. Sudah 360 kali dilaksanakan Adapun pelaksanaan dakwah daiyah Ramadhan ini sebagai berikut:

- 1) Tahun 2018 sudah 90 kali dilaksanakan dakwah daiyah Ramadhan di Gampong-gampong
- 2) Tahun 2019 sudah 90 kali dilaksanakan dakwah daiyah Ramadhan di Gampong-gampong

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Ibrahim Plt Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada 12 Juni 2022.

3) Tahun 2020 sudah 90 kali dilaksanakan dakwah daiyah Ramadhan di Gampong-gampong

4) Tahun 2021 sudah 90 kali dilaksanakan dakwah daiyah Ramadhan di Gampong-gampong

c. Zikir gemilang

Zikir gemilang ini dilaksanakan setiap malam jum'at pelaksanaan ini sudah diadakan 69 kali di adakan Adapun pelaksanaannya sebagai berikut:

1) Tahun 2018 sudah 29 kali dilaksanakan zikir gemilang di masjid-masjid

2) Tahun 2019 sudah 28 kali dilaksanakan zikir gemilang di masjid-masjid

3) Tahun 2020 sudah 7 kali dilaksanakan zikir gemilang di masjid-masjid

4) Tahun 2021 sudah 5 kali dilaksanakan zikir gemilang di masjid-masjid.⁶⁶

d. Safari Dakwah Simpatik (Dakwah Meupet-pet)

Dakwah simpatik ini sudah 128 kali dilaksanakan pelaksanaannya di adakan oleh pihak WH dan bertujuan untuk mengingatkan masyarakat Kota Band Aceh supaya mematuhi syariat Islam. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut:

1) Tahun 2018 sudah 44 kali dilaksanakan safari dakwah simpatik

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Ibrahim Plt Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada 12 Juni 2022.

- 2) Tahun 2019 sudah 44 kali dilaksanakan safari dakwah simpatik
- 3) Tahun 2020 sudah 40 kali sudah dilaksanakan safari dakwah simpatik.⁶⁷

e. Dakwah Warung Kopi

Dakwah warung kopi dilaksanakan di setiap tempat warung kopi sudah 22 kali diadakan pada tempat-tempat warung kopi Adapun pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Tahun 2018 sudah 10 kali dilaksanakan dakwah di warung kopi
- 2) Tahun 2019 sudah 10 kali dilaksanakan dakwah di warung kopi
- 3) Tahun 2020 sudah 1 kali dilaksanakan dakwah di warung kopi
- 4) Tahun 2021 sudah 1 kali dilaksanakan dakwah di warung kopi

f. Safari Dakwah Sekolah

Safari dakwah ke tempat sekolah-sekolah sudah 73 kali dilaksanakan. Adapun pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Tahun 2018 sudah 28 kali dilaksanakan safari dakwah kesekolah
- 2) Tahun 2019 sudah 20 kali dilaksanakan safari dakwah kesekolah
- 3) Tahun 2020 sudah 10 kali dilaksanakan safari dakwah kesekolah
- 4) Tahun 2021 sudah 15 kali dilaksanakan safari dakwah kesekolah.⁶⁸

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Ibrahim Plt Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada 12 Juni 2022.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Ibrahim Plt Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada 12 Juni 2022.

2. Peluang dan Tantangan dalam Penerapan Misi Wali Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pelaksanaan Syari'at Islam

a. Peluang

Adapun peluang dalam penerapan Misi Wali Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak dan ibadah Seperti di adakannya zikir gemilang, Safari dakwah daiyah jum'at, Dakwah Daiyah Ramadhan, Dakwah Simpatik, Dakwah Warung Kopi, Safari Dakwah Sekolah-sekolah, dengan begitu masyarakat Kota Banda Aceh lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt dan menjalankan perintah-Nya.⁶⁹

b. Tantangan

Adapun tantangan dalam penerapan Misi Wali Kota Banda Aceh Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dibidang penguatan aqidah akhlak dan ibadah bersumber dari Masyarakat itu sendiri kurangnya berpartisipasi dalam menjalankan syariat islam. Adapun kurangnya tenaga kerja, tidak tersedia dengan cukup karena banyaknya item pekerjaan tertentu membutuhkan personil yang banyak. Dan juga minimnya masalah pendanaan.⁷⁰

3. Keberhasilan dan Hambatan Misi Wali Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam

a. keberhasilan

Adapun Keberhasilan dalam Penerapan Misi Wali Kota Banda Aceh sebagai berikut: suksesnya penerapan misi Wali Kota Banda Aceh dalam Bidang Penguatan Aqidah, Akhlak dan Ibadah yang di tandai dengan berhasilnya kegiatan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Ibrahim Plt Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada 12 Juni 2022.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Ibrahim Plt Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada 12 Juni 2022.

tersebut yang di laksanakan di sejumlah masjid, sekolah-sekolah dan warung kopi di Kota Banda Aceh.⁷¹

b. Hambatan

Adapun hambatan penerapan misi Wali Kota Banda Aceh diantaranya ada beberapa hambatan terutama dalam suasana Covid-19 banyak kegiatan yang terhambat dan di *cancel*, selain itu juga Covid-19 ini juga membutuhkan dana yang besar sehingga banyak dana dan kegiatan terkuras untuk membiayai penanganan Covid-19, diantara banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan misalnya *talhib* ramadhan yaitu dengan rencana menghimpun banyak orang agar bisa mentalhibkan ramadhan dengan semangat menyambut ramadhan tetapi karna adanya covid kembali terhambat dan tidak bisa di lakukan. Kemudian ada maulid raya, dakwah ramadhan juga tidak bisa di lakukan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang terhambat karena situasi Covid-19 tersebut.⁷²

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Ibrahim Plt Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada 12 Juni 2022.

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Ibrahim Plt Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada 12 Juni 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan terkait dengan penerapan misi Wali Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang penguatan Aqidah, Akhlak dan Ibadah maka hasil penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Penerapan Misi Wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak dan ibadah. Dalam penerapan Misi Wali Kota Banda Aceh ini beliau lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dan keimanan kepada Allah Swt.
2. Adapun peluang dan tantangan dalam penerapan misi Wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak dan ibadah, yakni peluang bersumber dari Masyarakat itu sendiri agar mau partisipasi dalam menjalankan syariat Islam dan tantangan yang dihadapi oleh pihak dinas syariat Islam kurangnya tenaga kerja, tidak tersedia dengan cukup karena banyaknya item pekerjaan tentu membutuhkan personil yang banyak, dan juga minimnya masalah pendanaan.
3. Sedangkan keberhasilan dan hambatan misi Wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah akhlak dan ibadah. Keberhasilan tersebut diantaranya diadakannya zikir gemilang, Safari dakwah daiyah Jum'at, Dakwah Daiyah Ramadhan,

4. Dakwah Simpatik, Dakwah Warung Kopi, Safari Dakwah Sekolah-sekolah. dengan begitu masyarakat Kota Banda Aceh lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. Adapun hambatan berupa kurangnya partisipasi dari pihak masyarakat dan tantangan yang dihadapi walikota dalam penerapan untuk meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam diantaranya ada beberapa hambatan misalnya terutama dalam suasana Covid-19 banyak kegiatan yang terhambat dan di *cancel*, di samping itu juga Covid-19 ini juga membutuhkan dana yang besar sehingga banyak dana dan kegiatan terkuras untuk membiayai penanganan Covid-19.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi penulis menyarankan beberapa hal terkait dengan misi Wali Kota Banda Aceh dalam mewujudkan masyarakat gemilang. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kepada pihak Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh agar mempertahankan implementasi misi Wali Kota Banda Aceh dalam aspek penguatan syariat Islam diharapkan dapat mempertahankan misi tersebut secara berkelanjutan.
2. Kepada pihak Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh dan menambahkan personil tenaga kerja agar dapat meningkatkan penguatan Akidah, akhlak, dan ibadah di Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy, *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan*, Makalah Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara. 1980
- Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2006
- Al Yasa' Abu Bakar, MA, *Sekilas Syariat Islam di Aceh*, (Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005
- Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Debi Agus Mayanti, *Strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Model Kota Madani*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018
- Dede Adistira, *Kepemimpinan Aminullah Usman Dalam Membangun Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020
- Freddy Rangkuti, *"Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis : Reorientasi Konsep Perencanaan"*
- George Ridzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012
- Hassan Shadily, *"Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia"*, Jakarta: Bina Aksara, 1989
- _____, Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu: Kontemplasi Filosofis Tentang Seluk-Beluk Sumber Dan Tujuan Ilmu Pengetahuan*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1979
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya 2004
- M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco, Bandung: Eresco, t.th
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, *Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Jakarta: lentera Hati, 2002

- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Masitoh & Laksmi Dewi, "*Strategi Pembelajaran*", Jakarta: DEPAG RI, 2009,
- Michael R. Porter, Fred R. David dan Wheelen-Hunger", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cetakan Ke 5
- Murtadha Mutahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, Bandung: Mizan, Cet. 1. 1986
- Muzakkir, *Konsep Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Kota Madani*" Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016
- Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2002
- Nanang Fatah, *Sistem penjaminan Mutu Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, bandung, Cet. II 2013
- Rusdi sufi Irini Rewi Wanti Seno Djunlat, *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997
- Ruslani, "Cak Nur, *Islam dan Pluralisme*" dalam *Pluralitas Agama, Kerukunan dan Keragaman*, Jakarta: PT Gramedia, Cet. ke -1, 2001
- Rohadi Abdul Fatah,"*Sosiologi Agama*", Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2004
- Sakdiah, *Manajemen Organisasi Islam*, Dakwah Ar-Raniry Press, 2015
- Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Aneka Cipta, 2002
- Sukisno, *Visi Misi, Rencana Strategis & Taktis dalam Perguruan Tinggi*, Curriculum Development practice 1, Engineering Education Development Project dalam <http://www.eng.unri.ac.id> diakses pada tanggal 30 Mei 2021.
- Suwari Akhmaddhian dan Anthon Fathanudien, "*Pertisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi*", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 2 No. 1 Januari 2015,

Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976

Soejono Soekamto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali, 1990

Syamsuddin, "*Diklat Antropolog Budaya*", Banda Aceh, Unsyiah, 1984

Wirawan, *teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012

Yayasan Penterjemahan Al-Quran. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Parca, 1983

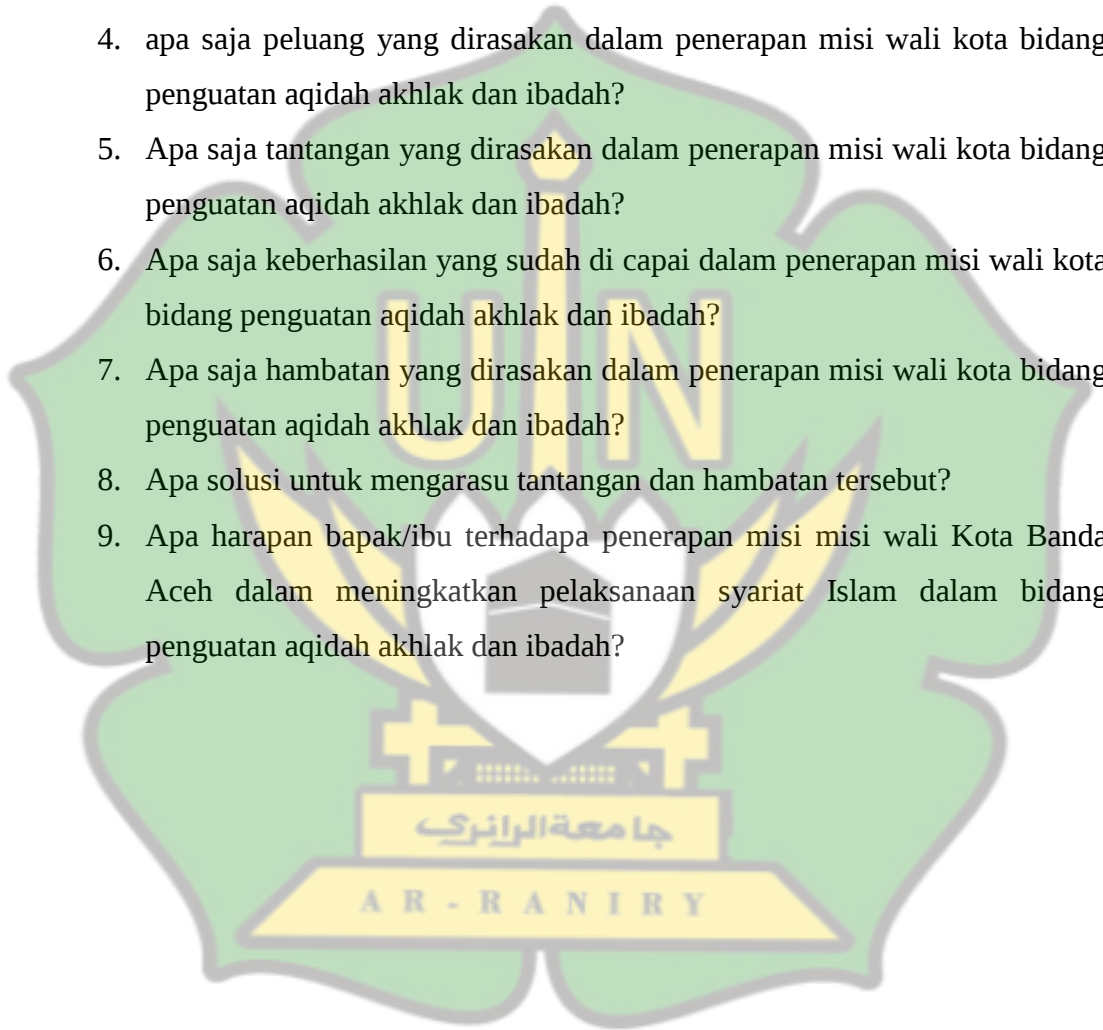
blog-indonesia.com/blog-archive-6802-124.html. Selasa, 24-11-2009. 9

<http://vio.co.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 20 Juli 2021

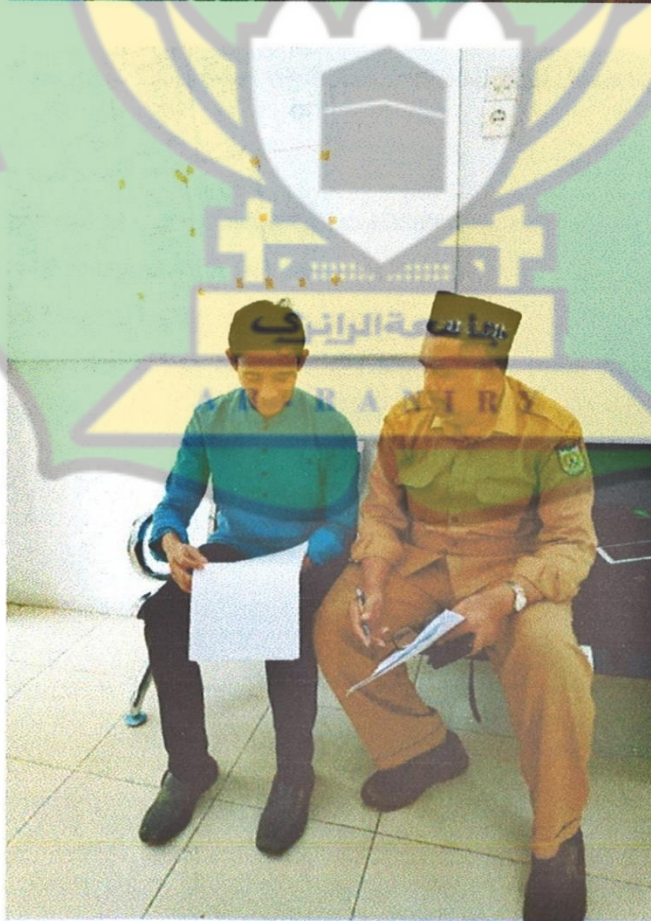


PEDOMAN WAWANACARA

1. Apa saja program yang dilakukan untuk menerapkan misi dalam peningkatan syariat Islam?
2. Selama ini bagaimana proses pelaksanaan misi wali kota?
3. Apakah misi selama ini sudah berjalan sesuai dengan perencanaan?
4. apa saja peluang yang dirasakan dalam penerapan misi wali kota bidang penguatan aqidah akhlak dan ibadah?
5. Apa saja tantangan yang dirasakan dalam penerapan misi wali kota bidang penguatan aqidah akhlak dan ibadah?
6. Apa saja keberhasilan yang sudah di capai dalam penerapan misi wali kota bidang penguatan aqidah akhlak dan ibadah?
7. Apa saja hambatan yang dirasakan dalam penerapan misi wali kota bidang penguatan aqidah akhlak dan ibadah?
8. Apa solusi untuk mengarasu tantangan dan hambatan tersebut?
9. Apa harapan bapak/ibu terhadap penerapan misi misi wali Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah akhlak dan ibadah?







**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B.288/Un.08/FDK/Kp.00.4/1/2021

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Mahmuddin, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
- 2). Raihan, S.Sos.I, MA (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
- Nama : Hanif Saputra Rahmatillah
- NIM/Jurusan : 150403022/Manajemen Dakwah (MD)
- Judul : Misi Wali Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Masyarakat Gemilang
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 21 Januari 2021
8 Jumadil Akhir 1442

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,


Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: **21 Januari 2022**